



SALINAN

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2175 TAHUN 2026
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peta jabatan di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2245 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diperbarui;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);
8. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 709);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.

- KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat informasi:
- a. susunan nama dan tingkat jabatan manajerial, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
 - b. kedudukan jabatan dalam unit kerja secara vertikal dan horizontal serta kelas jabatan pada masing-masing jabatan; dan
 - c. jumlah kebutuhan aparatur sipil negara untuk setiap jabatan,
- pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- KETIGA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penataan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2245 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2026

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

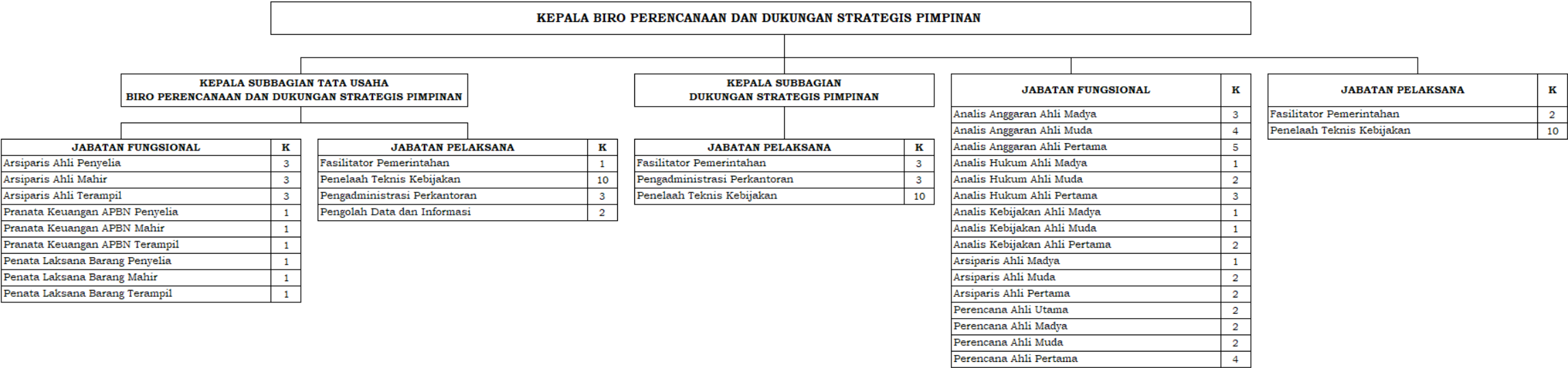
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KEPALA BIRO HUKUM,



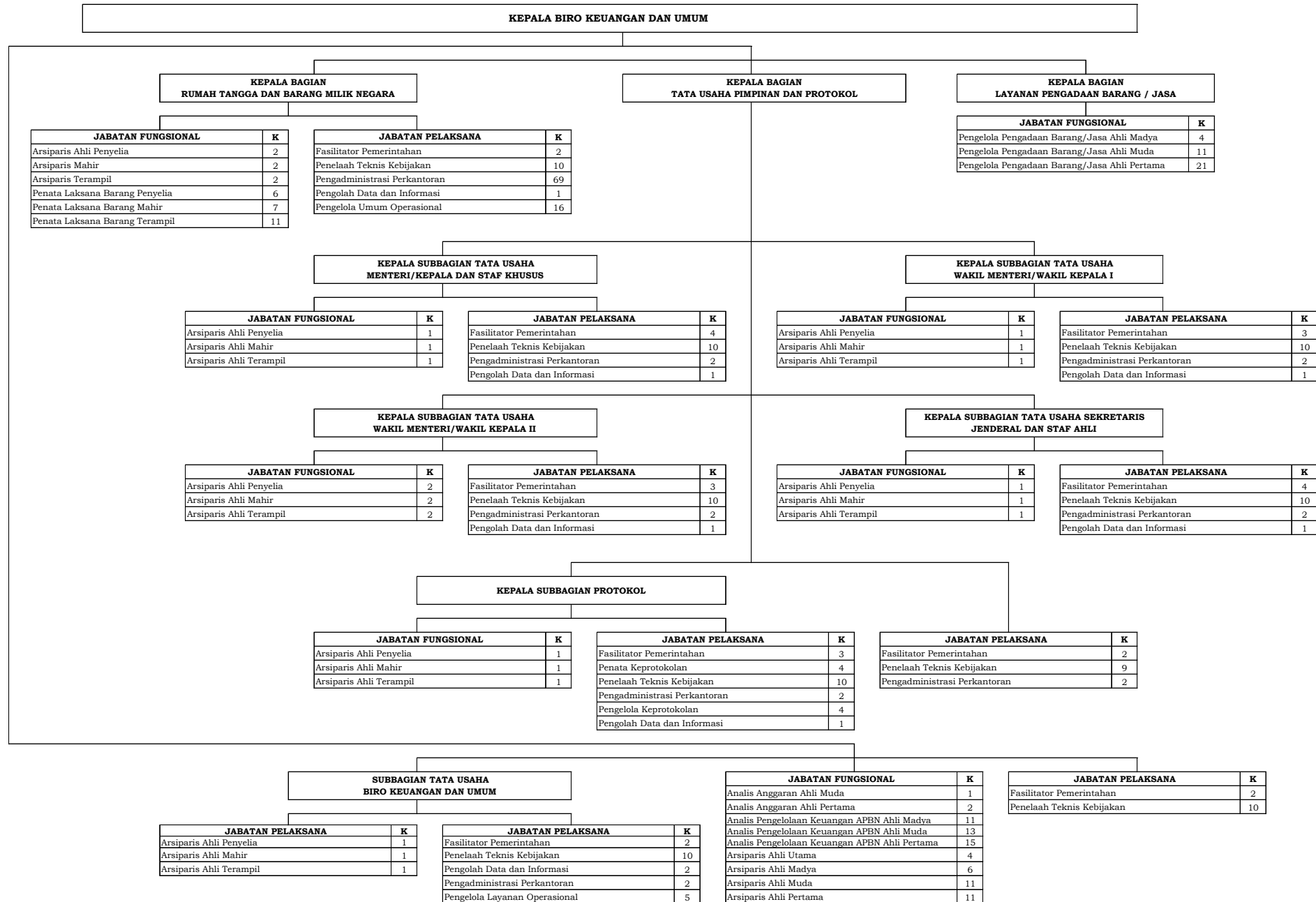
WAHYUDI PUTRA, S.H.
NIP.19790807 200501 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2175 TAHUN 2026
TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

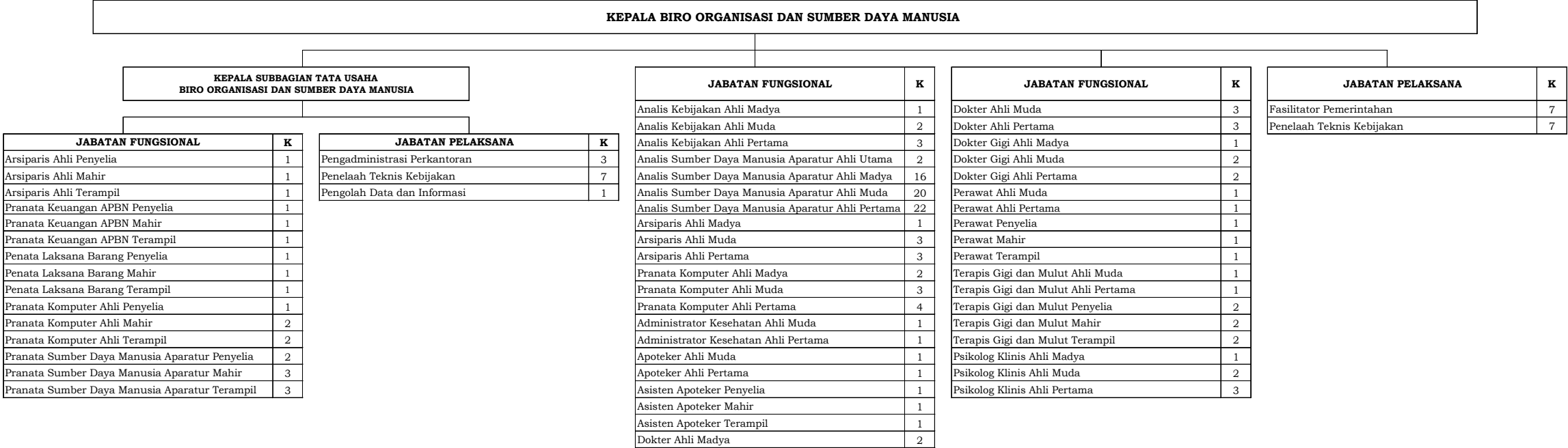
A. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
1. BIRO PERENCANAAN DAN DUKUNGAN STRATEGIS PIMPINAN



2. BIRO KEUANGAN DAN UMUM



3. BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA



4. BIRO HUKUM

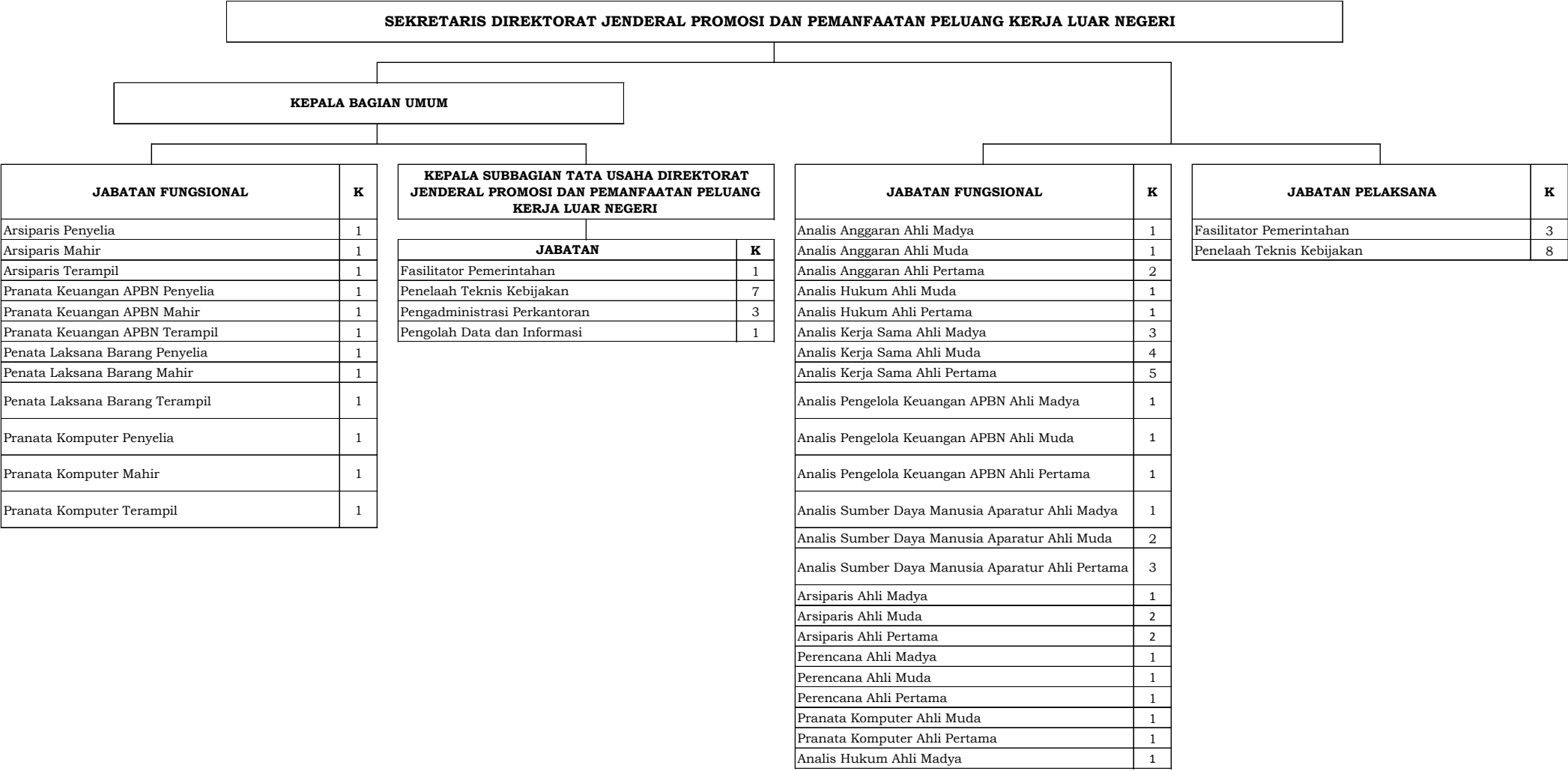


5. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA



B. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI

1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI



2. DIREKTORAT PEMETAAN PASAR KERJA LUAR NEGERI

DIREKTUR PEMETAAN PASAR KERJA LUAR NEGERI			
JABATAN FUNGSIONAL		K	
Analisis Hukum Ahli Madya		1	
Analisis Hukum Ahli Muda		1	
Analisis Hukum Ahli Pertama		1	
Analisis Kebijakan Ahli Madya		2	
Analisis Kebijakan Ahli Muda		2	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama		3	
Pengantar Kerja Ahli Madya		4	
Pengantar Kerja Ahli Muda		6	
Pengantar Kerja Ahli Pertama		8	
Penyuluh Hukum Ahli Muda		1	
Penyuluh Hukum Ahli Pertama		1	
JABATAN PELAKSANA		K	
Fasilitator Pemerintahan		2	
Penelaah Teknis Kebijakan		15	
Pengadministrasi Perkantoran		3	
Pengolah Data dan Informasi		2	

3. DIREKTORAT PENINGKATAN KAPASITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DIREKTUR PENINGKATAN KAPASITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA			
JABATAN FUNGSIONAL		JABATAN PELAKSANA	
	K		K
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Fasilitator Pemerintahan	4
Analisis Hukum Ahli Muda	1	Penelaah Teknis Kebijakan	15
Analisis Hukum Ahli Pertama	1	Pengadministrasi Perkantoran	3
Analisis Kebijakan Ahli Madya	2	Pengolah Data dan Informasi	2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	5		
Pengantar Kerja Ahli Utama	1		
Pengantar Kerja Ahli Madya	4		
Pengantar Kerja Ahli Muda	6		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	8		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	1		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	1		

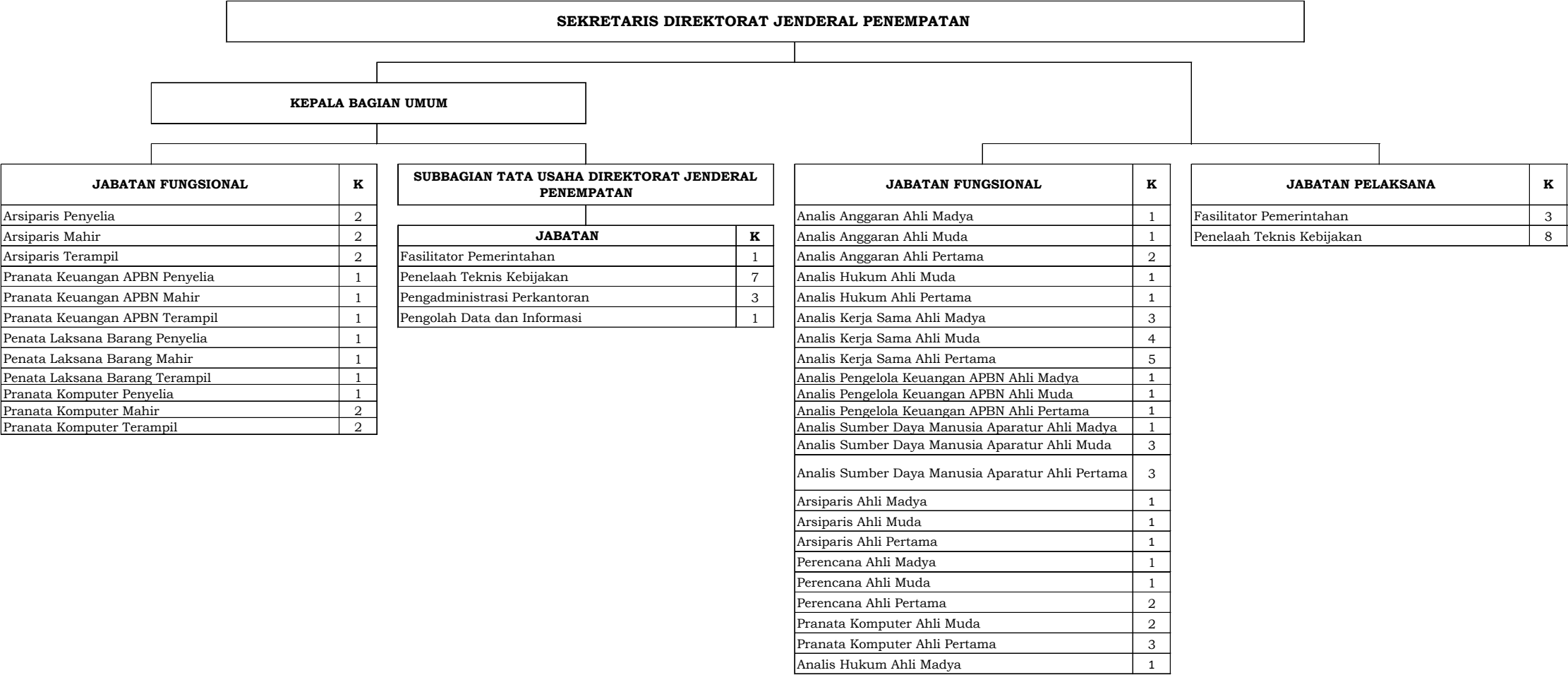
4. DIREKTORAT PEMBINAAN KELEMBAGAAN VOKASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DIREKTUR PEMBINAAN KELEMBAGAAN VOKASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA			
JABATAN FUNGSIONAL	K	JABATAN PELAKSANA	K
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Fasilitator Pemerintahan	2
Analisis Hukum Ahli Muda	1	Penelaah Teknis Kebijakan	15
Analisis Hukum Ahli Pertama	1	Pengadministrasi Perkantoran	3
Analisis Kebijakan Ahli Madya	2	Pengolah Data dan Informasi	2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	5		
Pengantar Kerja Ahli Madya	4		
Pengantar Kerja Ahli Muda	6		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	8		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	1		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	1		

5. DIREKTORAT PROMOSI DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

DIREKTUR PROMOSI DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI			
JABATAN FUNGSIONAL	K	JABATAN PELAKSANA	K
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Fasilitator Pemerintahan	2
Analisis Hukum Ahli Muda	2	Penelaah Teknis Kebijakan	15
Analisis Hukum Ahli Pertama	2	Pengadministrasi Perkantoran	3
Analisis Kebijakan Ahli Utama	1	Pengolah Data dan Informasi	2
Analisis Kebijakan Ahli Madya	2		
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	5		
Analisis Kerja Sama Ahli Madya	2		
Analisis Kerja Sama Ahli Muda	3		
Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	3		
Pengantar Kerja Ahli Madya	4		
Pengantar Kerja Ahli Muda	7		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	9		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	1		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	1		

C. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN
1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN



2. DIREKTORAT PENEMPATAN NONPEMERINTAH PADA PEMBERI KERJA PERSEORANGAN

DIREKTUR PENEMPATAN NONPEMERINTAH PADA PEMBERI KERJA PERSEORANGAN			
JABATAN FUNGSIONAL	K	JABATAN PELAKSANA	K
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Fasilitator Pemerintahan	1
Analisis Hukum Ahli Muda	2	Penelaah Teknis Kebijakan	15
Analisis Hukum Ahli Pertama	2	Pengadministrasi Perkantoran	3
Analisis Kebijakan Ahli Madya	2	Pengolah Data dan Informasi	2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	4		
Pengantar Kerja Ahli Madya	4		
Pengantar Kerja Ahli Muda	7		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	9		
Penyuluh Hukum Ahli Madya	1		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	1		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	1		

3. DIREKTORAT PENEMPATAN NONPEMERINTAH PADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM

DIREKTUR PENEMPATAN NONPEMERINTAH PADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM			
JABATAN FUNGSIONAL		JABATAN PELAKSANA	
	K		K
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Fasilitator Pemerintahan	2
Analisis Hukum Ahli Muda	2	Penelaah Teknis Kebijakan	15
Analisis Hukum Ahli Pertama	2	Pengadministrasi Perkantoran	3
Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	Pengolah Data dan Informasi	2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	3		
Pengantar Kerja Ahli Madya	5		
Pengantar Kerja Ahli Muda	7		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	9		
Penyuluh Hukum Ahli Madya	1		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	2		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	2		

4. DIREKTORAT PENEMPATAN PEMERINTAH

DIREKTUR PENEMPATAN PEMERINTAH			
JABATAN FUNGSIONAL	K	JABATAN PELAKSANA	K
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Fasilitator Pemerintahan	5
Analisis Hukum Ahli Muda	2	Penelaah Teknis Kebijakan	15
Analisis Hukum Ahli Pertama	2	Pengadministrasi Perkantoran	3
Analisis Kebijakan Ahli Utama	1	Pengolah Data dan Informasi	2
Analisis Kebijakan Ahli Madya	2		
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	4		
Pengantar Kerja Ahli Utama	2		
Pengantar Kerja Ahli Madya	8		
Pengantar Kerja Ahli Muda	17		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	18		
Penyuluh Hukum Ahli Madya	1		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	1		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	1		

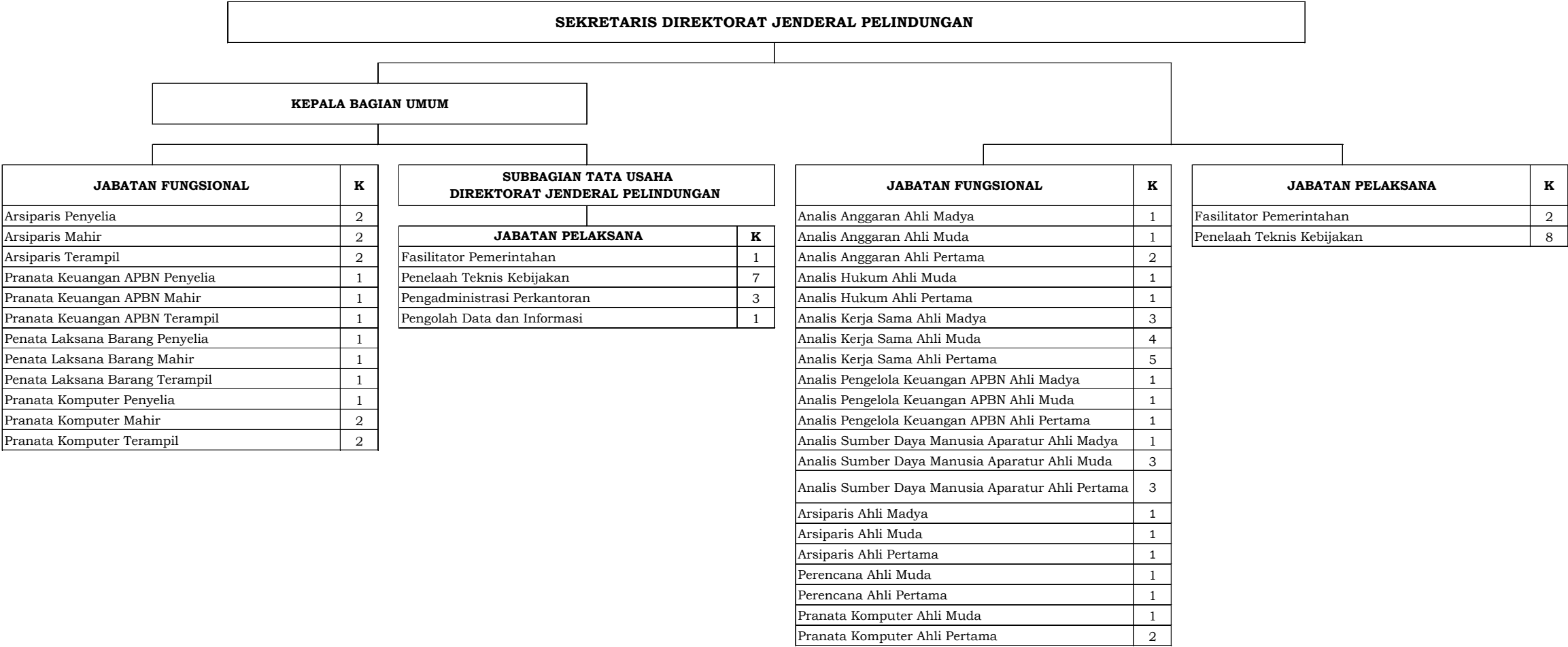
5. DIREKTORAT PENEMPATAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN

DIREKTUR PENEMPATAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN			
JABATAN FUNGSIONAL		JABATAN PELAKSANA	
	K		K
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Fasilitator Pemerintahan	2
Analisis Hukum Ahli Muda	2	Penelaah Teknis Kebijakan	15
Analisis Hukum Ahli Pertama	2	Pengadministrasi Perkantoran	3
Analisis Kebijakan Ahli Madya	2	Pengolah Data dan Informasi	2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	4		
Pengantar Kerja Ahli Madya	4		
Pengantar Kerja Ahli Muda	7		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	9		
Penyuluh Hukum Ahli Madya	1		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	1		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	1		

6. DIREKTORAT KELEMBAGAAN PENEMPATAN

DIREKTUR KELEMBAGAAN PENEMPATAN			
JABATAN FUNGSIONAL	K	JABATAN PELAKSANA	K
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Fasilitator Pemerintahan	3
Analisis Hukum Ahli Muda	2	Penelaah Teknis Kebijakan	15
Analisis Hukum Ahli Pertama	2	Pengadministrasi Perkantoran	3
Analisis Kebijakan Ahli Utama	1	Pengolah Data dan Informasi	2
Analisis Kebijakan Ahli Madya	2		
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	4		
Pengantar Kerja Ahli Utama	1		
Pengantar Kerja Ahli Madya	6		
Pengantar Kerja Ahli Muda	7		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	9		

D. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN
1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN



2. DIREKTORAT SIBER PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DIREKTUR SIBER PELINDUNGAN PMI			
JABATAN FUNGSIONAL	K	JABATAN PELAKSANA	K
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Fasilitator Pemerintahan	2
Analisis Hukum Ahli Muda	1	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	2
Analisis Hukum Ahli Pertama	1	Penelaah Teknis Kebijakan	15
Analisis Kebijakan Ahli Madya	2	Pengadministrasi Perkantoran	3
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	Pengolah Data dan Informasi	2
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	4		
Pengantar Kerja Ahli Madya	3		
Pengantar Kerja Ahli Muda	6		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	8		
Penyuluh Hukum Ahli Madya	1		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	2		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	2		

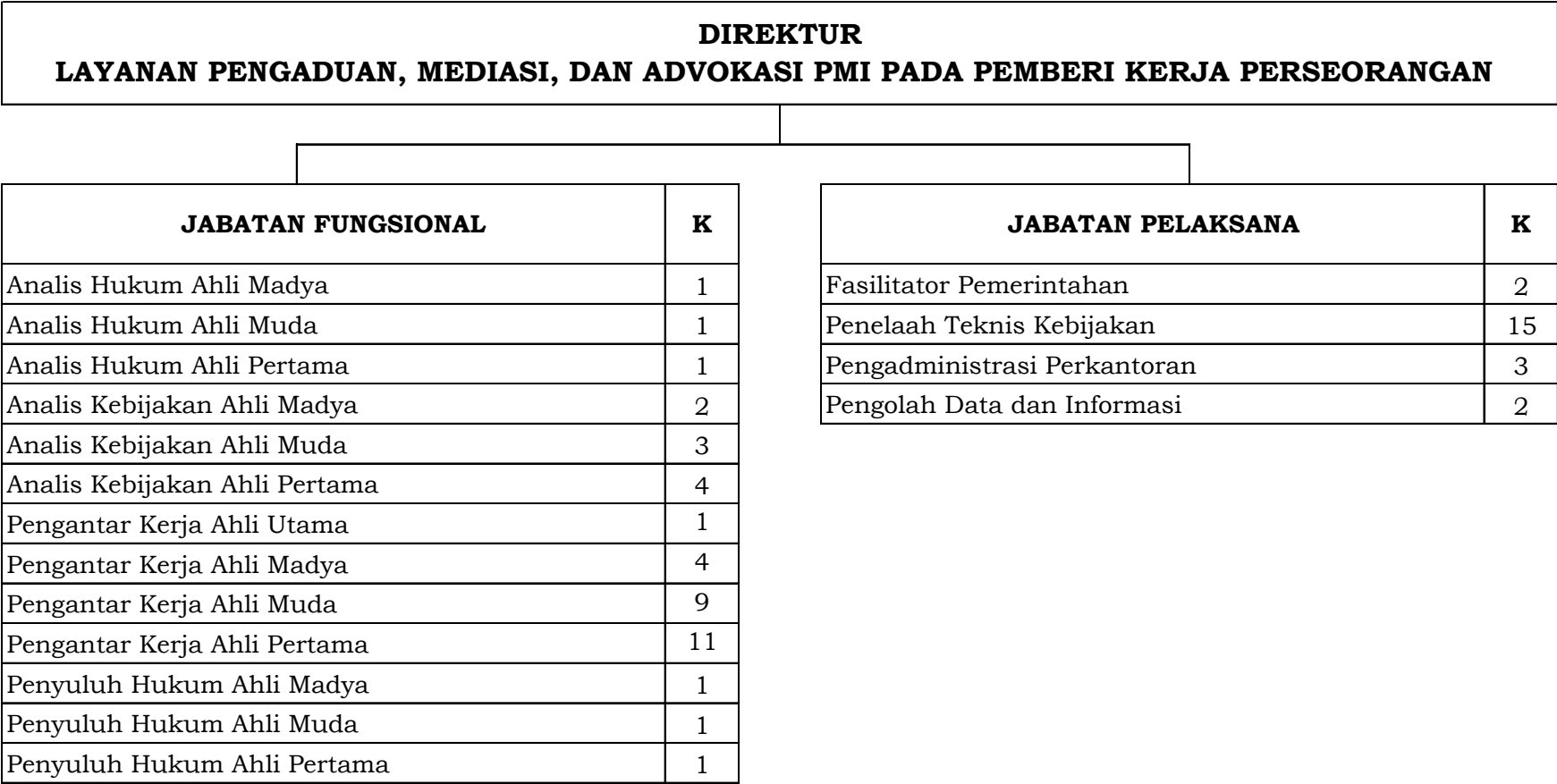
3. DIREKTORAT BINA KEMITRAAN PELINDUNGAN

DIREKTUR BINA KEMITRAAN PELINDUNGAN			
JABATAN FUNGSIONAL	K	JABATAN PELAKSANA	K
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Fasilitator Pemerintahan	4
Analisis Hukum Ahli Muda	1	Penelaah Teknis Kebijakan	15
Analisis Hukum Ahli Pertama	1	Pengadministrasi Perkantoran	3
Analisis Kebijakan Ahli Utama	1	Pengolah Data dan Informasi	2
Analisis Kebijakan Ahli Madya	2		
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	4		
Pengantar Kerja Ahli Madya	4		
Pengantar Kerja Ahli Muda	6		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	8		
Penyuluh Hukum Ahli Madya	1		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	1		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	1		

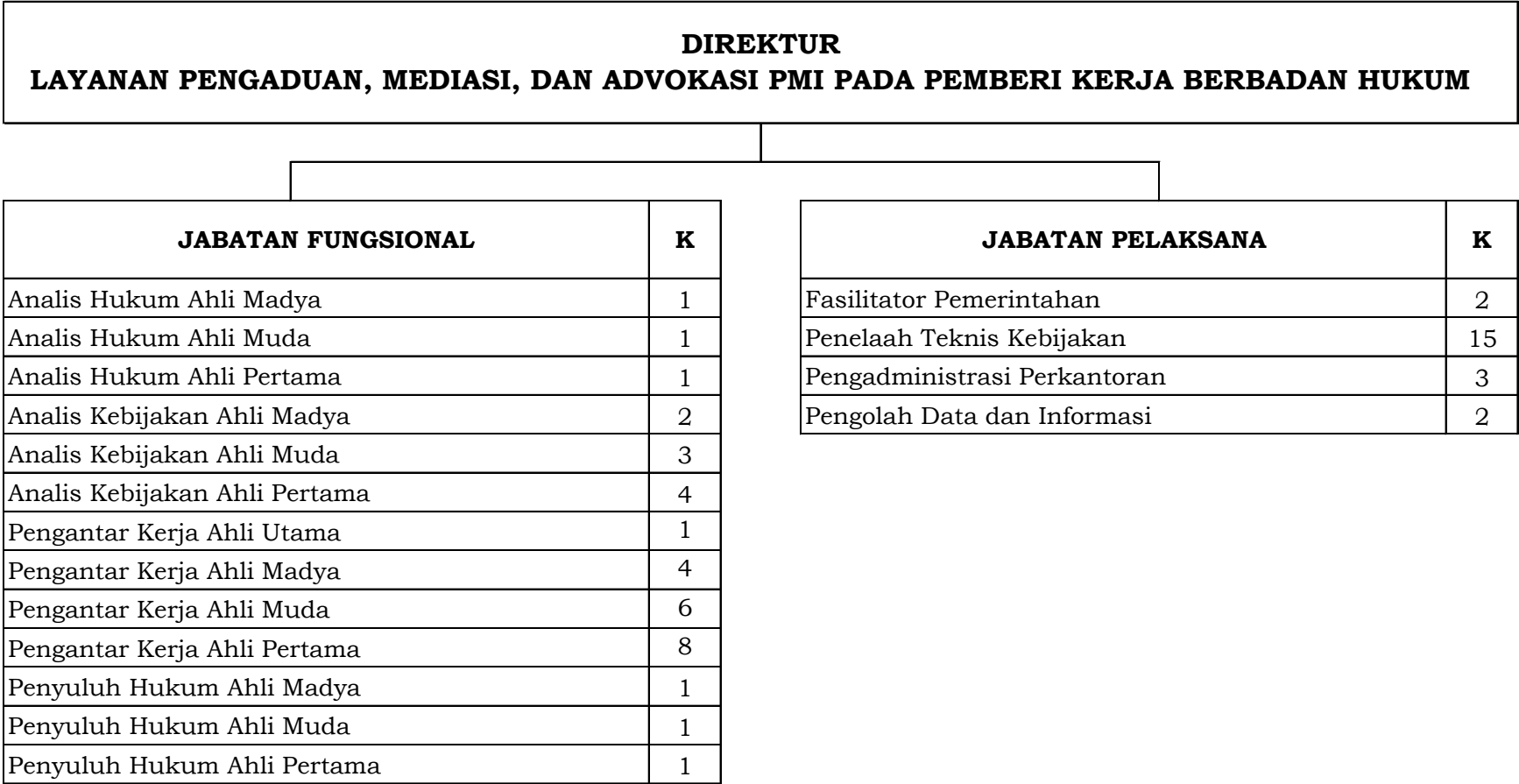
4. DIREKTORAT PENGAWASAN, PENCEGAHAN, DAN PENINDAKAN

DIREKTUR PENGAWASAN PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN			
JABATAN FUNGSIONAL	K	JABATAN PELAKSANA	K
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Fasilitator Pemerintahan	2
Analisis Hukum Ahli Muda	2	Penelaah Teknis Kebijakan	15
Analisis Hukum Ahli Pertama	2	Pengadministrasi Perkantoran	3
Analisis Kebijakan Ahli Madya	2	Pengolah Data dan Informasi	2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	4		
Pengantar Kerja Ahli Utama	1		
Pengantar Kerja Ahli Madya	4		
Pengantar Kerja Ahli Muda	6		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	8		
Penyuluh Hukum Ahli Madya	1		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	1		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	1		

5. DIREKTORAT LAYANAN PENGADUAN, MEDIASI, DAN ADVOKASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA PEMBERI KERJA PERSEORANGAN

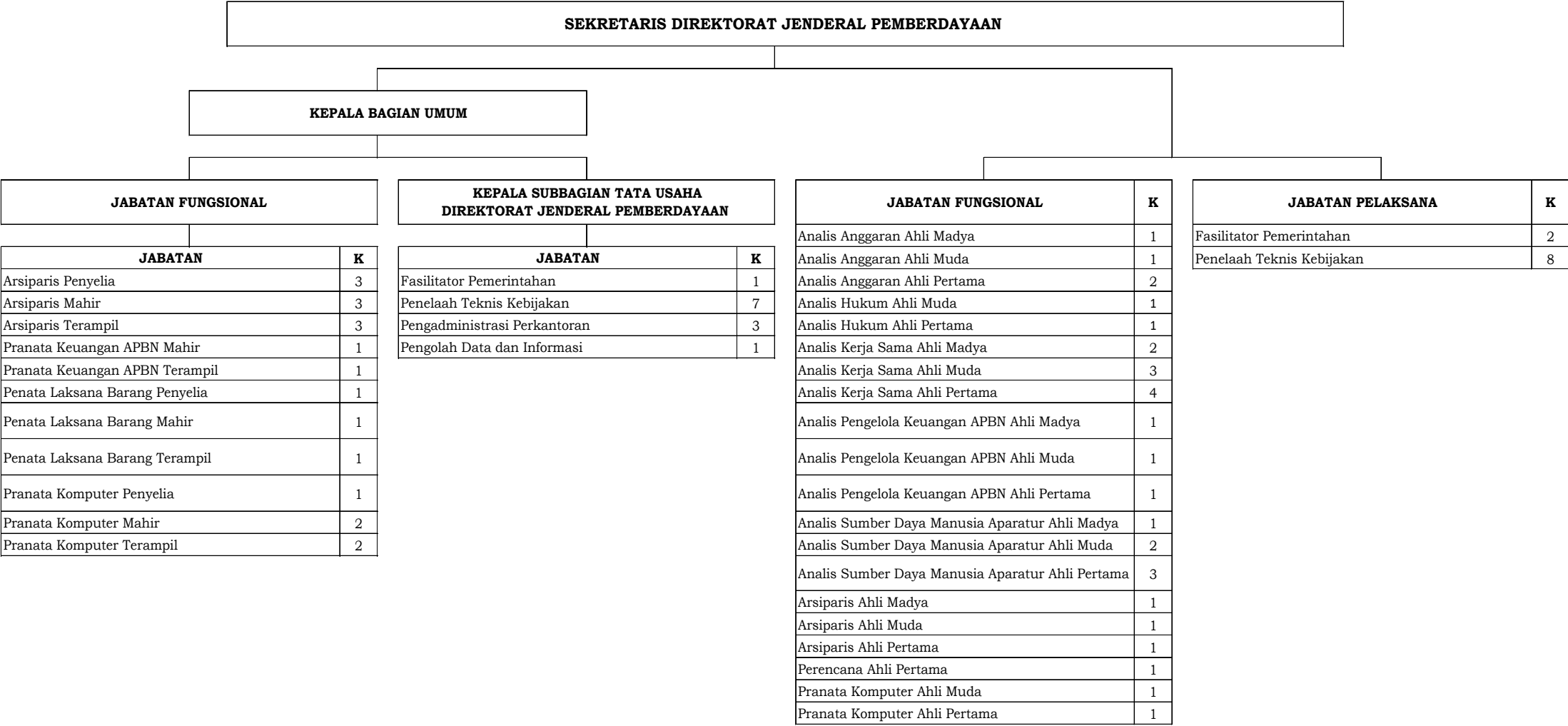


6. DIREKTORAT LAYANAN PENGADUAN, MEDIASI, DAN ADVOKASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM



E. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN

1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN



2. DIREKTORAT LITERASI KEUANGAN DAN PEMANFAATAN REMITANSI

DIREKTUR LITERASI KEUANGAN DAN PEMANFAATAN REMITANSI			
JABATAN FUNGSIONAL	K	JABATAN PELAKSANA	K
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Fasilitator Pemerintahan	3
Analisis Hukum Ahli Muda	2	Penelaah Teknis Kebijakan	15
Analisis Hukum Ahli Pertama	2	Pengadministrasi Perkantoran	3
Analisis Kebijakan Ahli Madya	2	Pengolah Data dan Informasi	2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	4		
Pengantar Kerja Ahli Madya	4		
Pengantar Kerja Ahli Muda	6		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	8		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	1		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	1		

3. DIREKTORAT KEPULANGAN DAN REHABILITASI

DIREKTUR KEPULANGAN DAN REHABILITASI			
JABATAN FUNGSIONAL	K	JABATAN PELAKSANA	K
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Fasilitator Pemerintahan	5
Analisis Hukum Ahli Muda	2	Penelaah Teknis Kebijakan	15
Analisis Hukum Ahli Pertama	2	Pengadministrasi Perkantoran	3
Analisis Kebijakan Ahli Madya	2	Pengolah Data dan Informasi	2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	4		
Pengantar Kerja Ahli Utama	1		
Pengantar Kerja Ahli Madya	4		
Pengantar Kerja Ahli Muda	6		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	8		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	1		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	1		

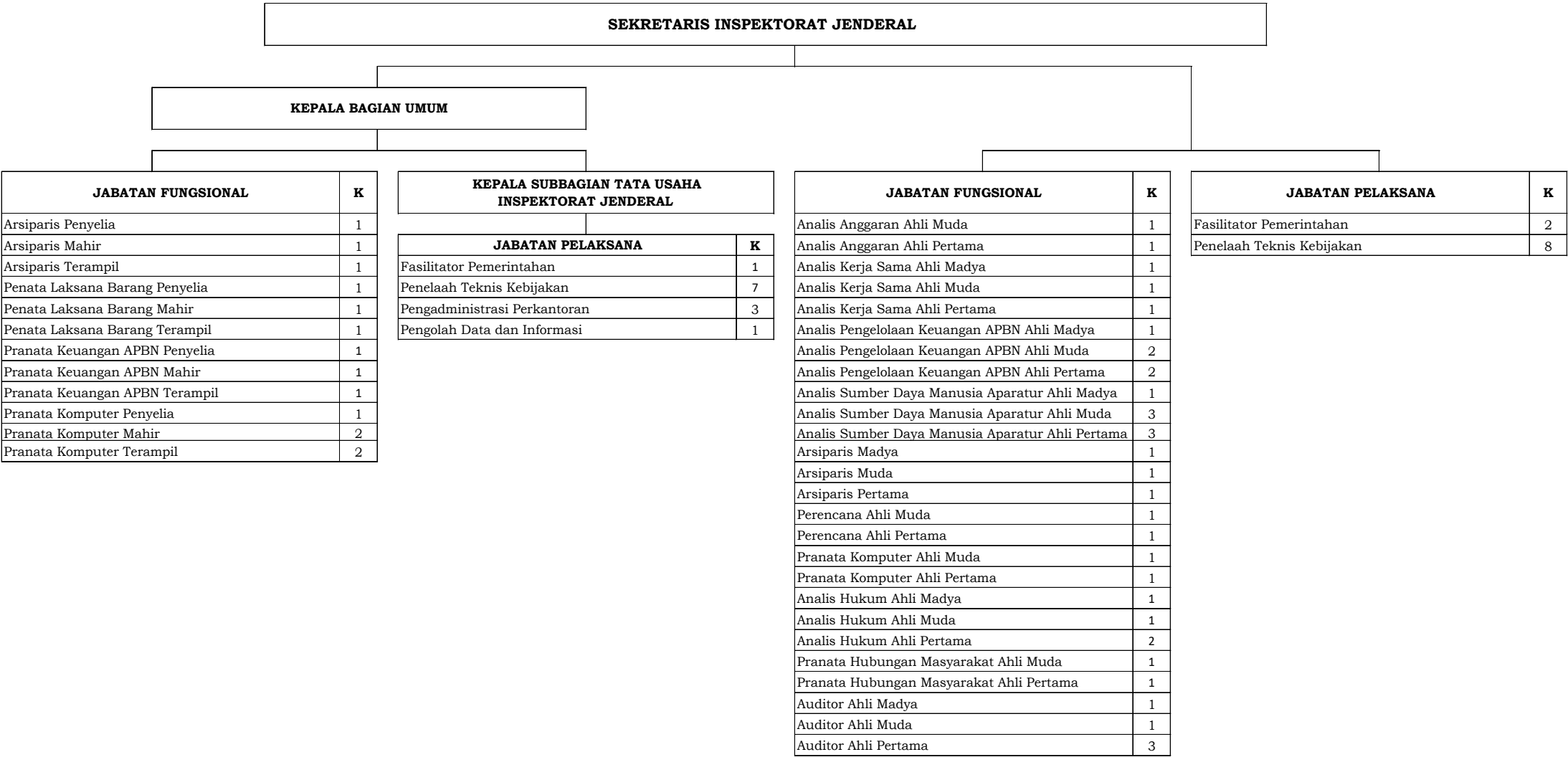
4. DIREKTORAT REINTEGRASI DAN PENGUATAN KELUARGA

DIREKTUR REINTEGRASI DAN PENGUATAN KELUARGA			
JABATAN FUNGSIONAL	K	JABATAN PELAKSANA	K
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Fasilitator Pemerintahan	2
Analisis Hukum Ahli Muda	2	Penelaah Teknis Kebijakan	15
Analisis Hukum Ahli Pertama	2	Pengadministrasi Perkantoran	3
Analisis Kebijakan Ahli Madya	2	Pengolah Data dan Informasi	2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	4		
Pengantar Kerja Ahli Madya	4		
Pengantar Kerja Ahli Muda	8		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	10		

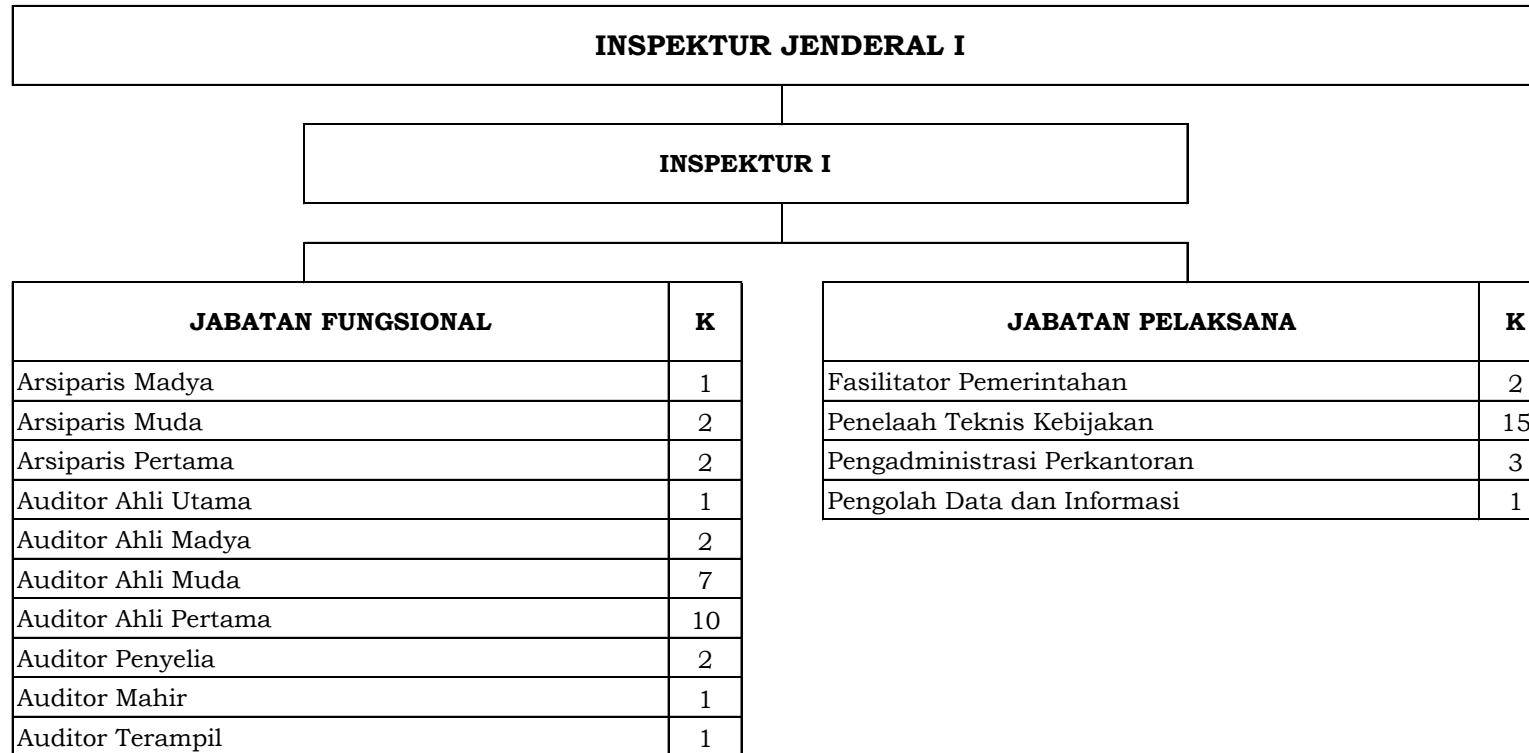
5. DIREKTORAT KEWIRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF

DIREKTUR KEWIRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF			
JABATAN FUNGSIONAL	K	JABATAN PELAKSANA	K
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Fasilitator Pemerintahan	3
Analisis Hukum Ahli Muda	1	Penelaah Teknis Kebijakan	15
Analisis Hukum Ahli Pertama	1	Pengadministrasi Perkantoran	3
Analisis Kebijakan Ahli Madya	2	Pengolah Data dan Informasi	2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	4		
Pengantar Kerja Ahli Madya	4		
Pengantar Kerja Ahli Muda	6		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	8		
Penyuluh Hukum Ahli Madya	1		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	1		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	1		

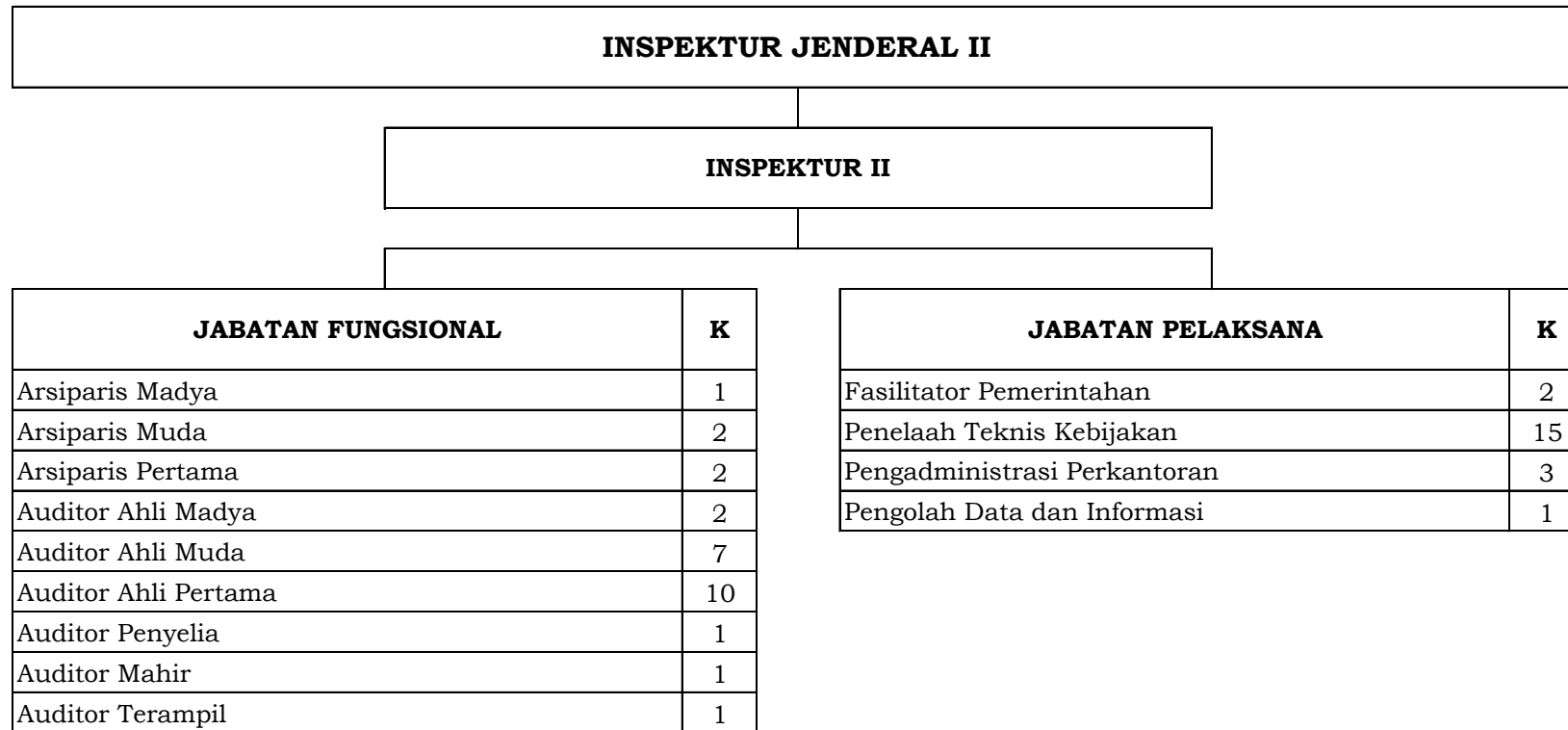
F. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
1. SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL



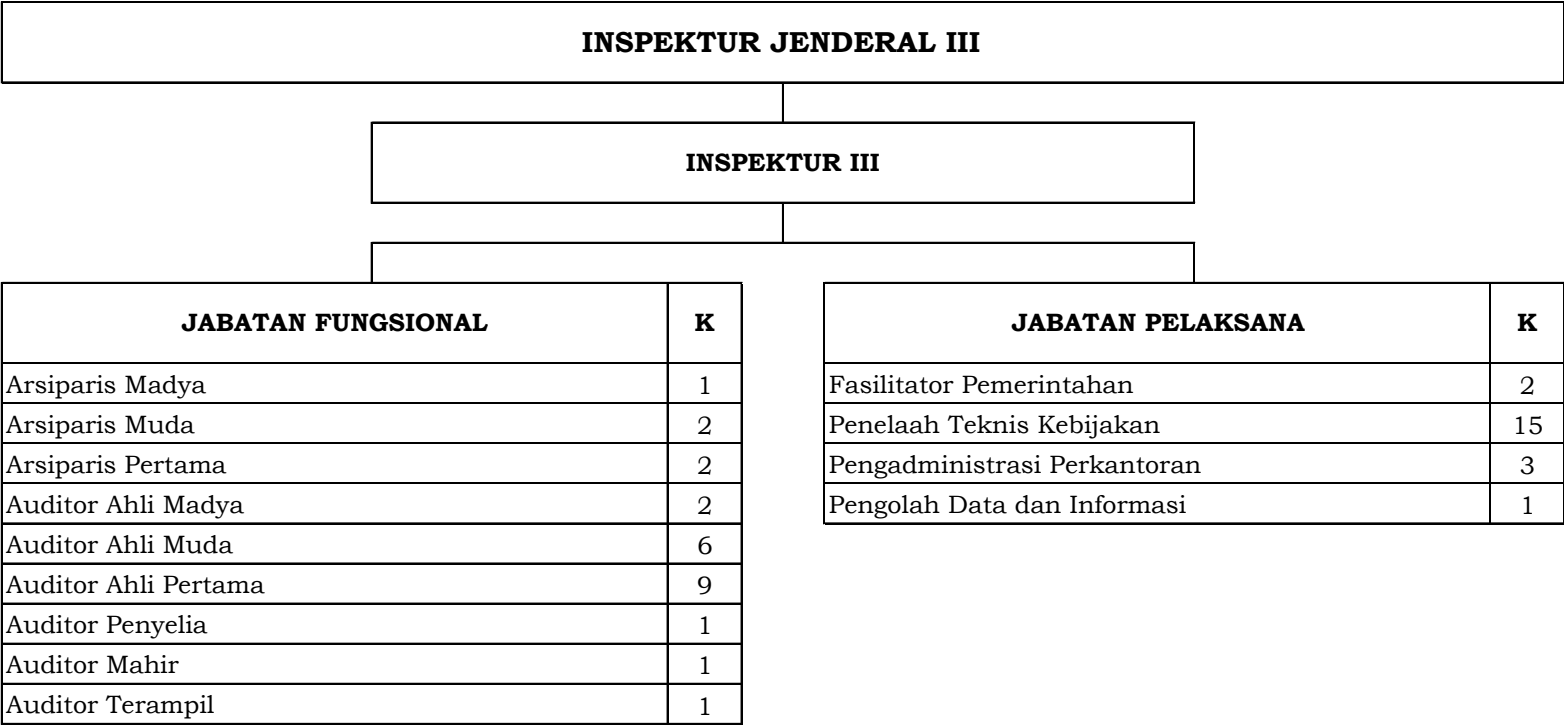
2. INSPEKTORAT I



3. INSPEKTORAT II



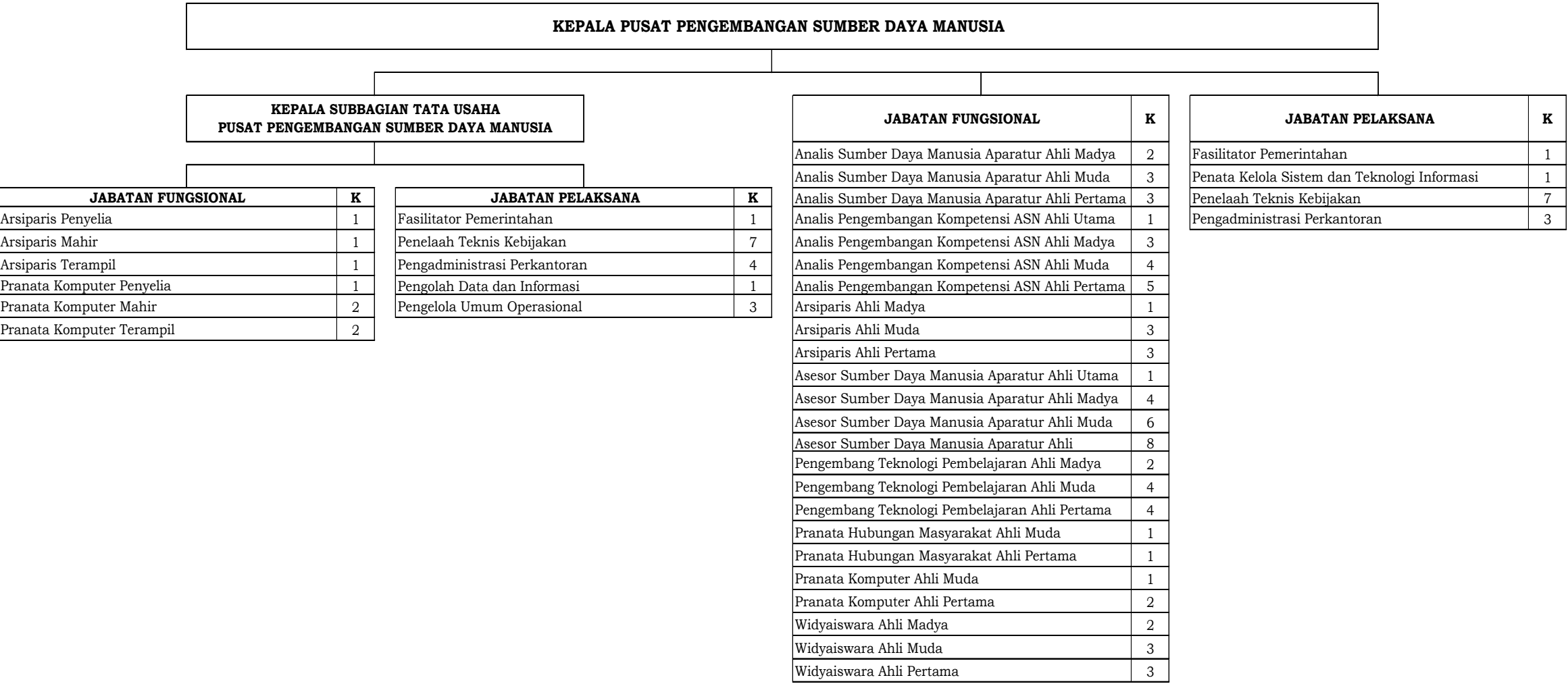
4. INSPEKTORAT III



G. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI

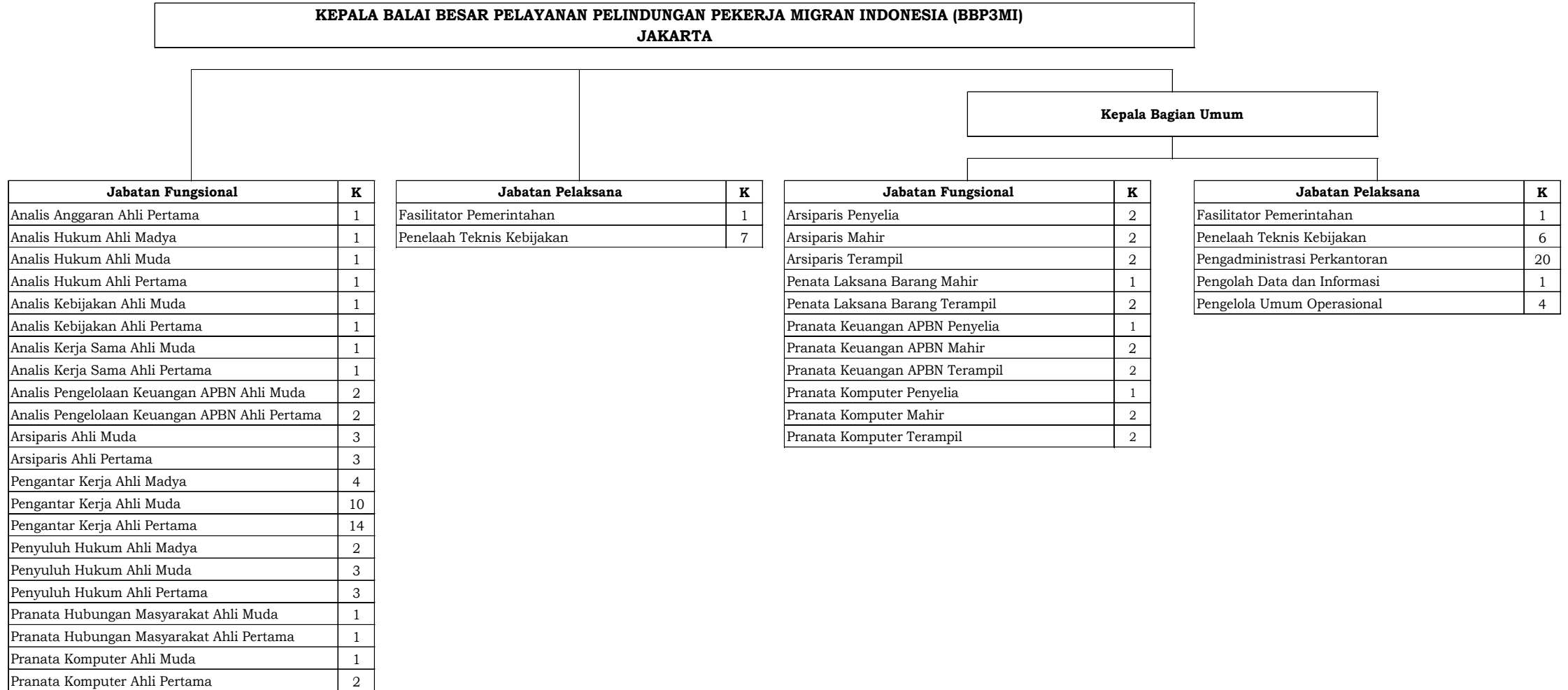


H. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



I. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

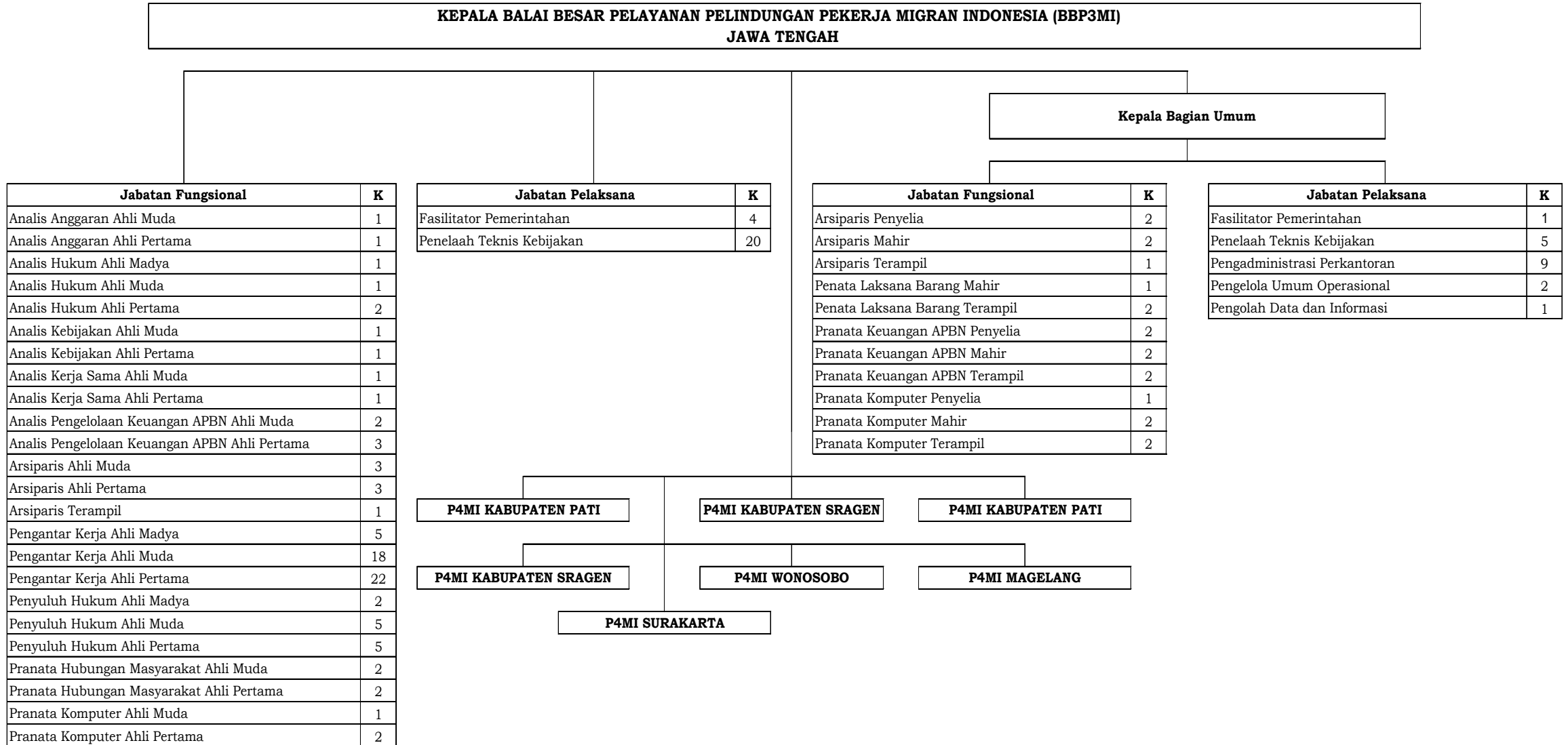
1. BALAI BESAR PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BBP3MI) DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



2. BALAI BESAR PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BBP3MI) BANTEN



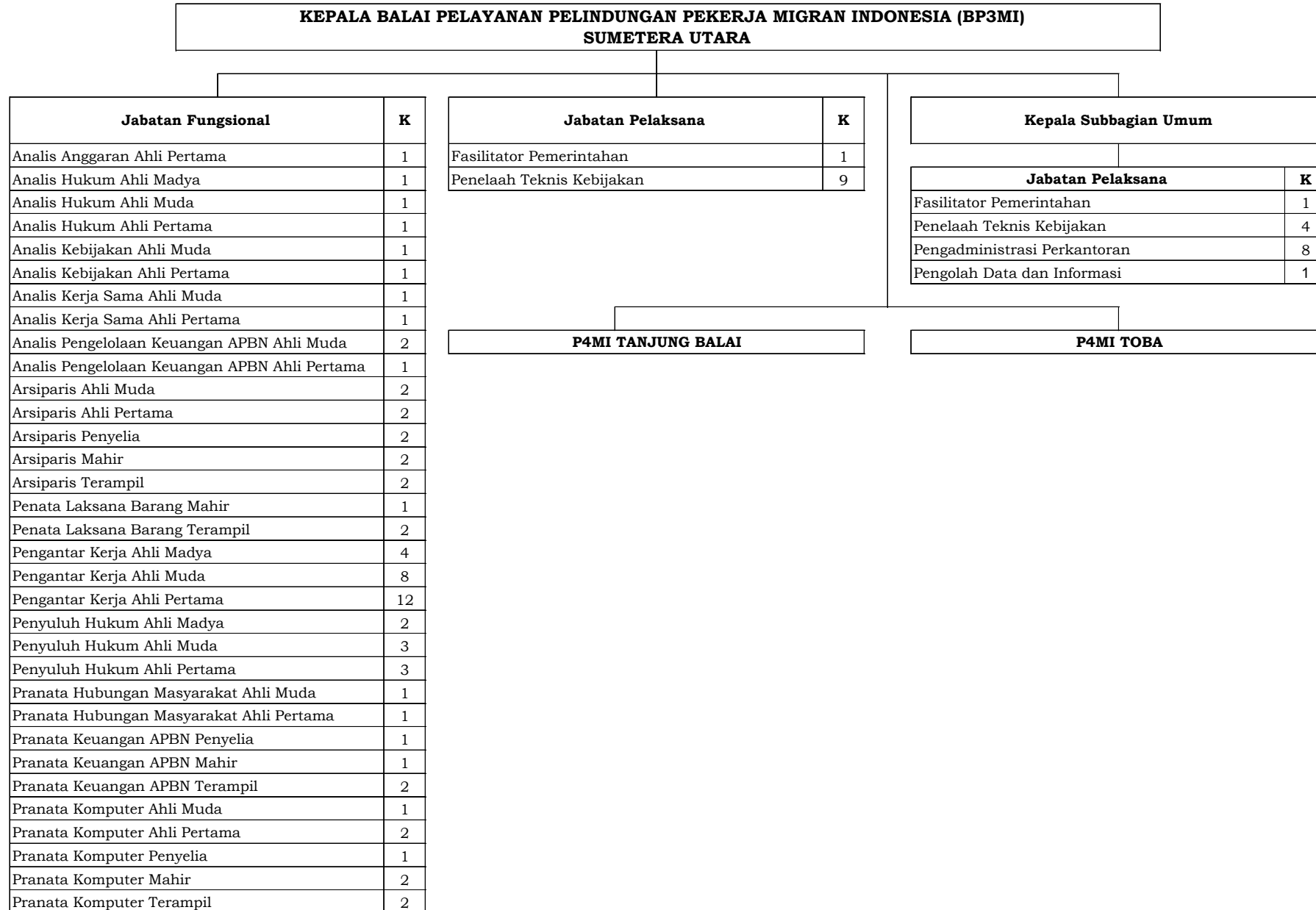
4. BALAI BESAR PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BBP3MI) JAWA TENGAH



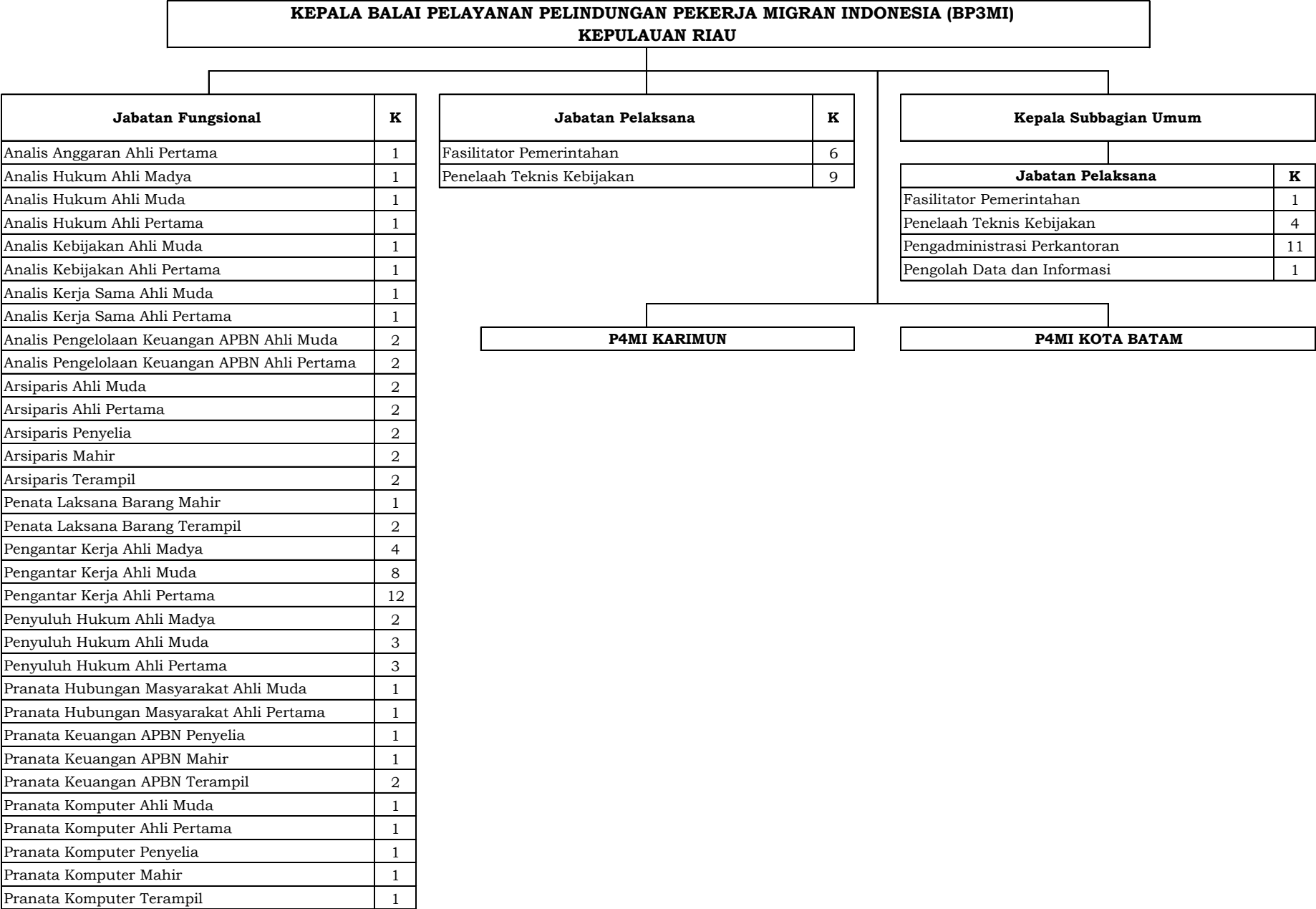
6. BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) ACEH

KEPALA BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) ACEH			
Jabatan Fungsional	K	Jabatan Pelaksana	K
Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	Fasilitator Pemerintahan	1
Analisis Hukum Ahli Muda	1	Penelaah Teknis Kebijakan	8
Analisis Hukum Ahli Pertama	1		
Analisis Kebijakan Ahli Muda	1		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1		
Analisis Kerja Sama Ahli Muda	1		
Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	1		
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2		
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1		
Arsiparis Ahli Muda	1		
Arsiparis Ahli Pertama	1		
Arsiparis Penyelia	1		
Arsiparis Mahir	1		
Arsiparis Terampil	1		
Penata Laksana Barang Mahir	1		
Penata Laksana Barang Terampil	2		
Pengantar Kerja Ahli Madya	4		
Pengantar Kerja Ahli Muda	6		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	8		
Penyuluh Hukum Ahli Madya	1		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	2		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	2		
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1		
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1		
Pranata Keuangan APBN Penyelia	1		
Pranata Keuangan APBN Mahir	1		
Pranata Keuangan APBN Terampil	1		
Pranata Komputer Ahli Pertama	1		
Pranata Komputer Penyelia	1		
Pranata Komputer Mahir	1		
Pranata Komputer Terampil	1		
		P4MI KABUPATEN ACEH TAMIANG	
		Kepala Subbagian Umum	
		Jabatan Pelaksana	K
		Fasilitator Pemerintahan	1
		Penelaah Teknis Kebijakan	5
		Pengadministrasi Perkantoran	3
		Pengolah Data dan Informasi	1

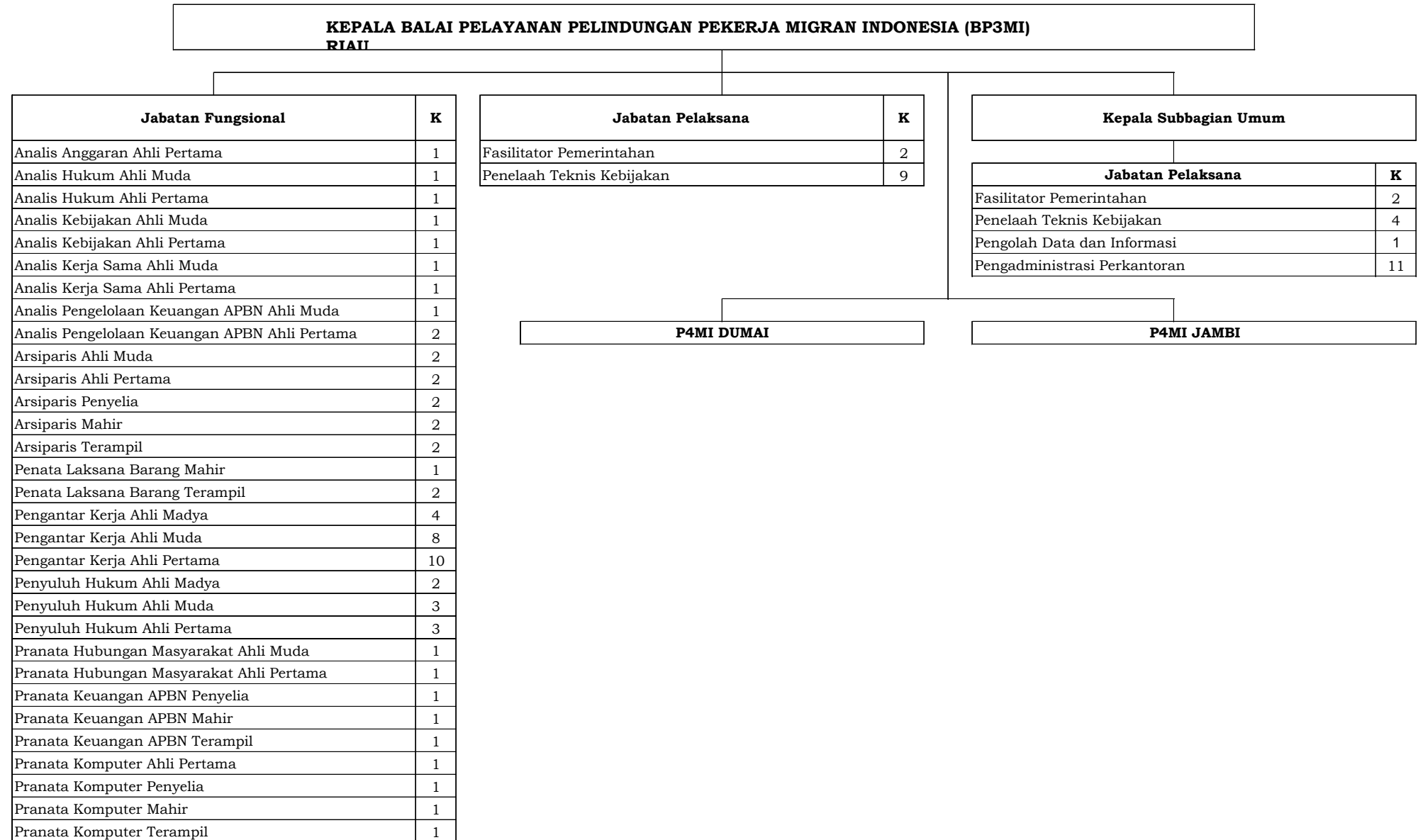
7. BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) SUMATERA UTARA



8. BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) KEPULAUAN RIAU



9. BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) RIAU



10. BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) SUMATERA BARAT

KEPALA BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) SUMATERA BARAT			
Jabatan Fungsional		Jabatan	
Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	Fasilitator Pemerintahan	1
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Penelaah Teknis Kebijakan	7
Analisis Hukum Ahli Muda	1		
Analisis Hukum Ahli Pertama	1		
Analisis Kebijakan Ahli Muda	1		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1		
Analisis Kerja Sama Ahli Muda	1		
Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	1		
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	3		
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2		
Arsiparis Ahli Muda	1		
Arsiparis Ahli Pertama	1		
Arsiparis Penyelia	1		
Arsiparis Mahir	1		
Arsiparis Terampil	1		
Penata Laksana Barang Mahir	1		
Penata Laksana Barang Terampil	2		
Pengantar Kerja Ahli Madya	4		
Pengantar Kerja Ahli Muda	6		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	10		
Penyuluh Hukum Ahli Madya	3		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	4		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	4		
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1		
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1		
Pranata Keuangan APBN Penyelia	1		
Pranata Keuangan APBN Mahir	1		
Pranata Keuangan APBN Terampil	1		
Pranata Komputer Ahli Muda	1		
Pranata Komputer Ahli Pertama	1		
Pranata Komputer Penyelia	1		
Pranata Komputer Mahir	1		
Pranata Komputer Terampil	1		
Kepala Subbagian Umum		Kepala Subbagian Umum	
		Jabatan	K
		Fasilitator Pemerintahan	1
		Penelaah Teknis Kebijakan	6
		Pengadministrasi Perkantoran	3
		Pengelola Umum Operasional	2
		Pengolah Data dan Informasi	1

12. BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) LAMPUNG

KEPALA BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) LAMPUNG					
Jabatan Fungsional		K	Jabatan Pelaksana		K
Analisis Anggaran Ahli Pertama		1	Fasilitator Pemerintahan		1
Analisis Hukum Ahli Madya		1	Penelaah Teknis Kebijakan		7
Analisis Hukum Ahli Muda		1			
Analisis Hukum Ahli Pertama		2			
Analisis Kebijakan Ahli Muda		1			
Analisis Kebijakan Ahli Pertama		1			
Analisis Kerja Sama Ahli Muda		1			
Analisis Kerja Sama Ahli Pertama		1			
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda		1			
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama		2			
Arsiparis Ahli Muda		1			
Arsiparis Ahli Pertama		1			
Arsiparis Penyelia		1			
Arsiparis Mahir		1			
Arsiparis Terampil		1			
Penata Laksana Barang Mahir		1			
Penata Laksana Barang Terampil		2			
Pengantar Kerja Ahli Madya		4			
Pengantar Kerja Ahli Muda		7			
Pengantar Kerja Ahli Pertama		11			
Penyuluh Hukum Ahli Madya		2			
Penyuluh Hukum Ahli Muda		3			
Penyuluh Hukum Ahli Pertama		3			
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda		1			
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama		1			
Pranata Keuangan APBN Penyelia		1			
Pranata Keuangan APBN Mahir		1			
Pranata Keuangan APBN Terampil		1			
Pranata Komputer Ahli Muda		1			
Pranata Komputer Ahli Pertama		1			
Pranata Komputer Penyelia		1			
Pranata Komputer Mahir		1			
Pranata Komputer Terampil		1			
			Kepala Subbagian Umum		
Jabatan			K		
Fasilitator Pemerintahan			1		
Penelaah Teknis Kebijakan			6		
Pengadministrasi Perkantoran			4		
Pengolah Data dan Informasi			1		
Pengelola Umum Operasional			1		

13. BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) YOGYAKARTA			
Jabatan Fungsional		Jabatan Pelaksana	
K		K	
Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	Fasilitator Pemerintahan	1
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Penelaah Teknis Kebijakan	6
Analisis Hukum Ahli Muda	1		
Analisis Hukum Ahli Pertama	1		
Analisis Kebijakan Ahli Muda	1		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1		
Analisis Kerja Sama Ahli Muda	1		
Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	1		
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2		
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2		
Arsiparis Ahli Muda	2		
Arsiparis Ahli Pertama	2		
Arsiparis Penyelia	1		
Arsiparis Mahir	1		
Arsiparis Terampil	1		
Penata Laksana Barang Mahir	1		
Penata Laksana Barang Terampil	2		
Pengantar Kerja Ahli Madya	5		
Pengantar Kerja Ahli Muda	9		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	12		
Penyuluh Hukum Ahli Madya	1		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	2		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	2		
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1		
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1		
Pranata Keuangan APBN Penyelia	1		
Pranata Keuangan APBN Mahir	1		
Pranata Keuangan APBN Terampil	2		
Pranata Komputer Ahli Muda	1		
Pranata Komputer Ahli Pertama	1		
Pranata Komputer Penyelia	1		
Pranata Komputer Mahir	1		
Pranata Komputer Terampil	1		

14. BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) BALI

KEPALA BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) BALI			
Jabatan Fungsional		Jabatan Pelaksana	
	K		K
Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	Fasilitator Pemerintahan	1
Analisis Hukum Ahli Muda	1	Penelaah Teknis Kebijakan	6
Analisis Hukum Ahli Pertama	1		
Analisis Kebijakan Ahli Muda	1		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1		
Analisis Kerja Sama Ahli Muda	1		
Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	1		
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2		
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2		
Arsiparis Ahli Muda	2		
Arsiparis Ahli Pertama	2		
Arsiparis Penyelia	1		
Arsiparis Mahir	1		
Arsiparis Terampil	1		
Penata Laksana Barang Mahir	1		
Penata Laksana Barang Terampil	2		
Pengantar Kerja Ahli Madya	4		
Pengantar Kerja Ahli Muda	8		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	11		
Penyuluh Hukum Ahli Madya	1		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	2		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	2		
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1		
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1		
Pranata Keuangan APBN Penyelia	1		
Pranata Keuangan APBN Mahir	1		
Pranata Keuangan APBN Terampil	1		
Pranata Komputer Ahli Muda	1		
Pranata Komputer Ahli Pertama	1		
Pranata Komputer Penyelia	1		
Pranata Komputer Mahir	1		
Pranata Komputer Terampil	1		

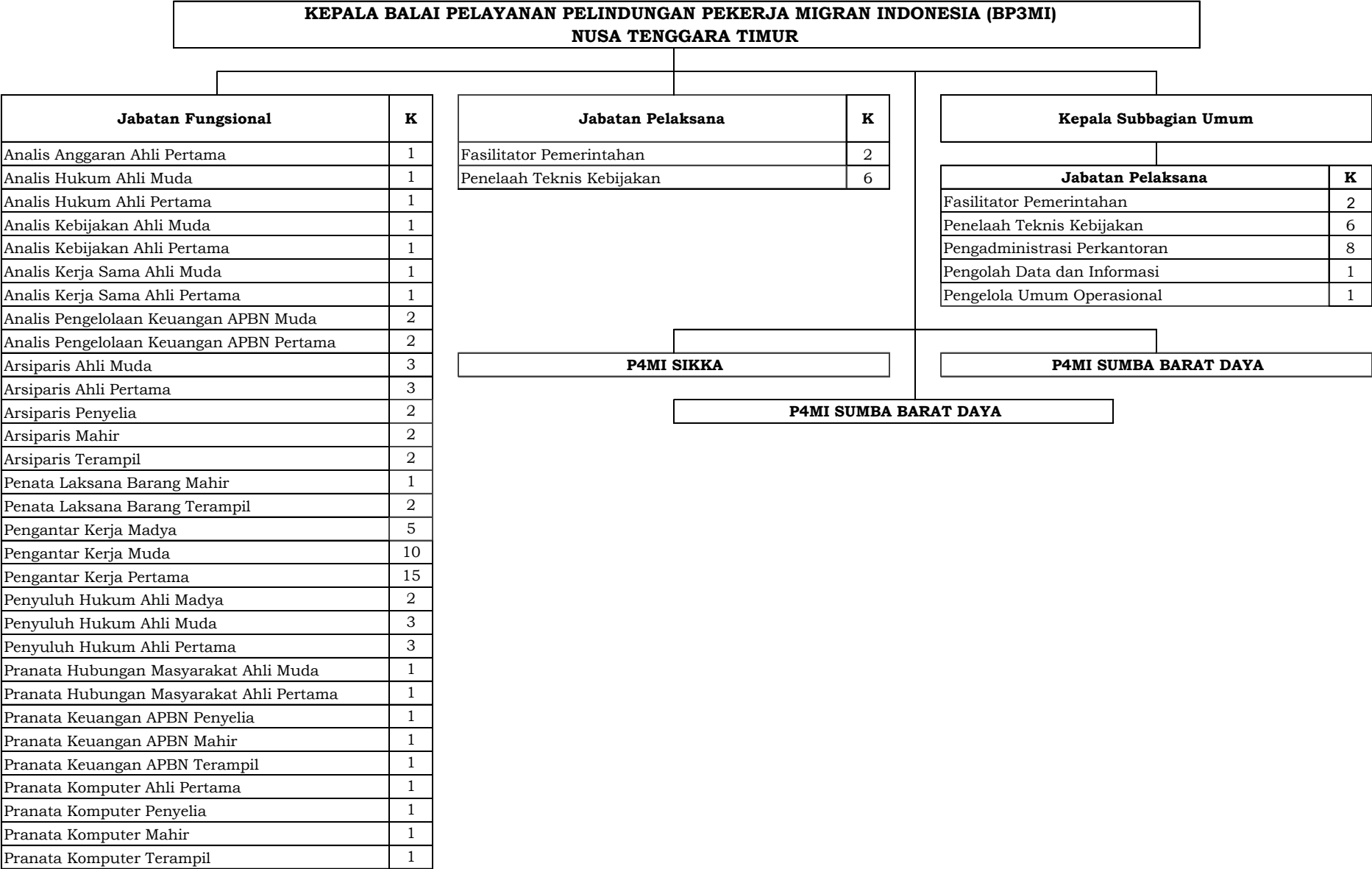
Kepala Subbagian Umum	
Jabatan Pelaksana	K
Fasilitator Pemerintahan	1
Penelaah Teknis Kebijakan	6
Pengadministrasi Perkantoran	6
Pengolah Data dan Informasi	1

15. BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) NUSA TENGGARA BARAT			
Jabatan Fungsional		Jabatan Pelaksana	
K		K	
Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	Fasilitator Pemerintahan	3
Analisis Hukum Ahli Madya	1	Penelaah Teknis Kebijakan	6
Analisis Hukum Ahli Muda	1		
Analisis Hukum Ahli Pertama	1		
Analisis Kebijakan Ahli Muda	1		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1		
Analisis Kerja Sama Ahli Muda	1		
Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	1		
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1		
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1		
Arsiparis Ahli Muda	3		
Arsiparis Ahli Pertama	4		
Arsiparis Penyelia	2		
Arsiparis Mahir	2		
Arsiparis Terampil	2		
Penata Laksana Barang Mahir	1		
Penata Laksana Barang Terampil	2		
Pengantar Kerja Ahli Madya	5		
Pengantar Kerja Ahli Muda	12		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	18		
Penyuluh Hukum Ahli Madya	2		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	2		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	2		
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1		
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1		
Pranata Keuangan APBN Penyelia	2		
Pranata Keuangan APBN Mahir	2		
Pranata Keuangan APBN Terampil	2		
Pranata Komputer Ahli Muda	1		
Pranata Komputer Ahli Pertama	2		
Pranata Komputer Penyelia	1		
Pranata Komputer Mahir	2		
Pranata Komputer Terampil	2		

Kepala Subbagian Umum	
Jabatan Pelaksana	K
Fasilitator Pemerintahan	2
Penelaah Teknis Kebijakan	6
Pengadministrasi Perkantoran	12
Pengolah Data dan Informasi	1

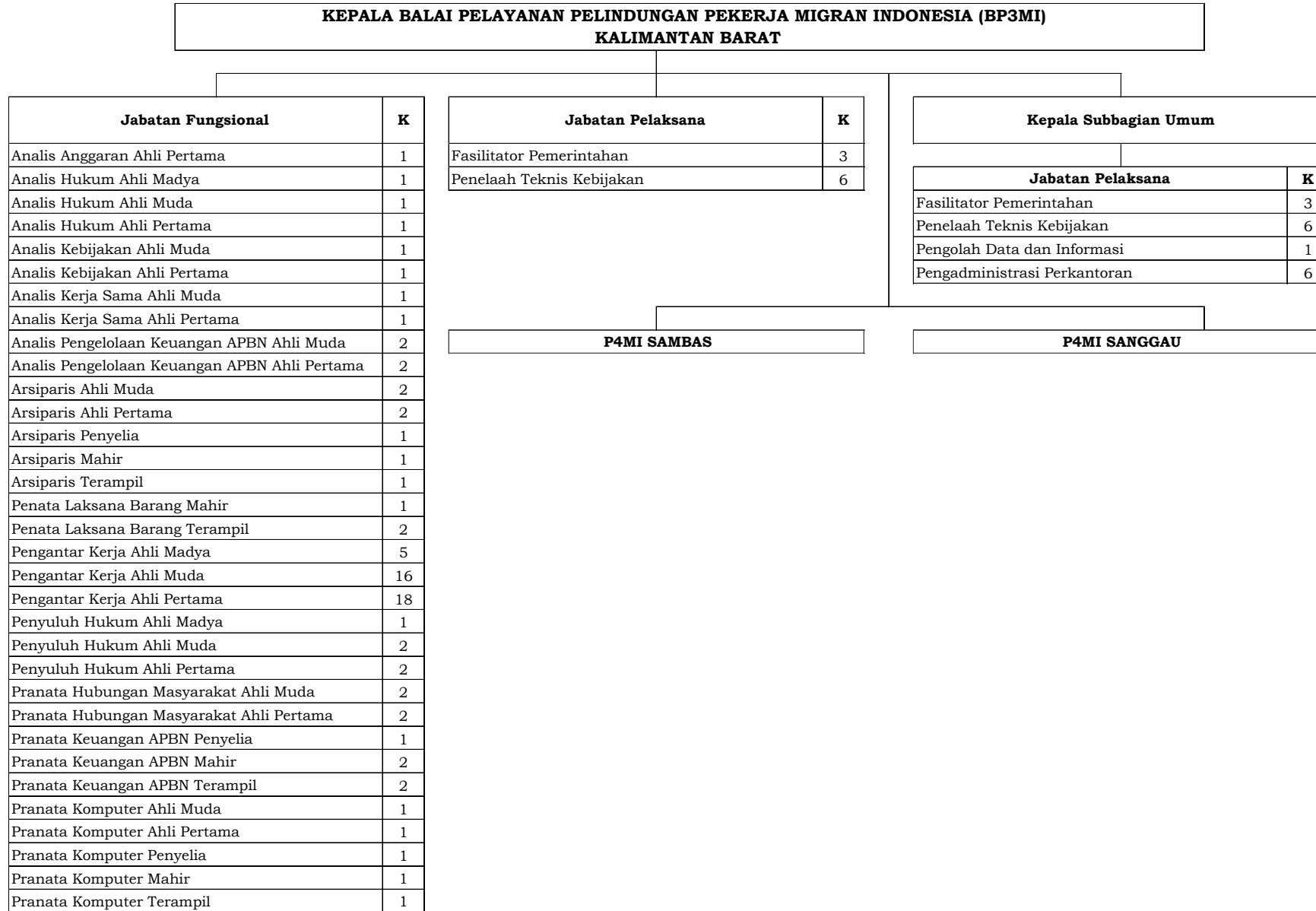
16. BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) NUSA TENGGARA TIMUR



17. BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) KALIMANTAN SELATAN

KEPALA BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) KALIMANTAN SELATAN							
Jabatan Fungsional		K	Jabatan Pelaksana		K	Kepala Subbagian Umum	
Analisis Anggaran Ahli Pertama		1	Fasilitator Pemerintahan		1		
Analisis Hukum Ahli Muda		1	Penelaah Teknis Kebijakan		6		
Analisis Hukum Ahli Pertama		1				Jabatan Pelaksana	
Analisis Kebijakan Ahli Muda		1				Fasilitator Pemerintahan	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama		1				Penelaah Teknis Kebijakan	
Analisis Kerja Sama Ahli Muda		1				Pengadministrasi Perkantoran	
Analisis Kerja Sama Ahli Pertama		1				Pengolah Data dan Informasi	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda		1					
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama		1					
Arsiparis Ahli Muda		1					
Arsiparis Ahli Pertama		1					
Arsiparis Penyelia		1					
Arsiparis Mahir		1					
Arsiparis Terampil		1					
Penata Laksana Barang Mahir		1					
Penata Laksana Barang Terampil		2					
Pengantar Kerja Ahli Madya		3					
Pengantar Kerja Ahli Muda		5					
Pengantar Kerja Ahli Pertama		7					
Penyuluh Hukum Ahli Madya		1					
Penyuluh Hukum Ahli Muda		2					
Penyuluh Hukum Ahli Pertama		2					
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda		1					
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama		1					
Pranata Keuangan APBN Penyelia		1					
Pranata Keuangan APBN Mahir		1					
Pranata Keuangan APBN Terampil		1					
Pranata Komputer Ahli Pertama		1					
Pranata Komputer Penyelia		1					
Pranata Komputer Mahir		1					
Pranata Komputer Terampil		1					

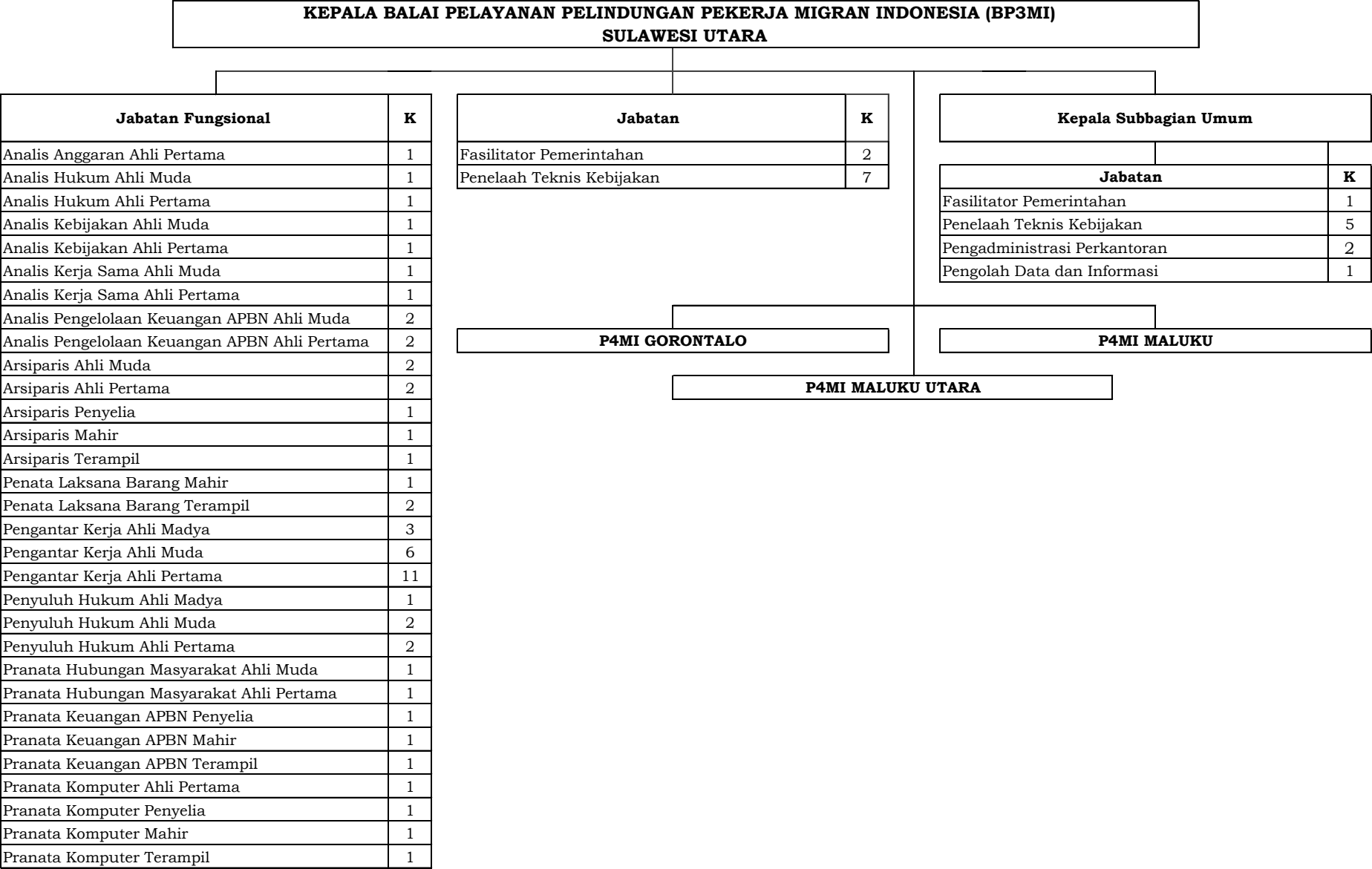
18. BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) KALIMANTAN BARAT



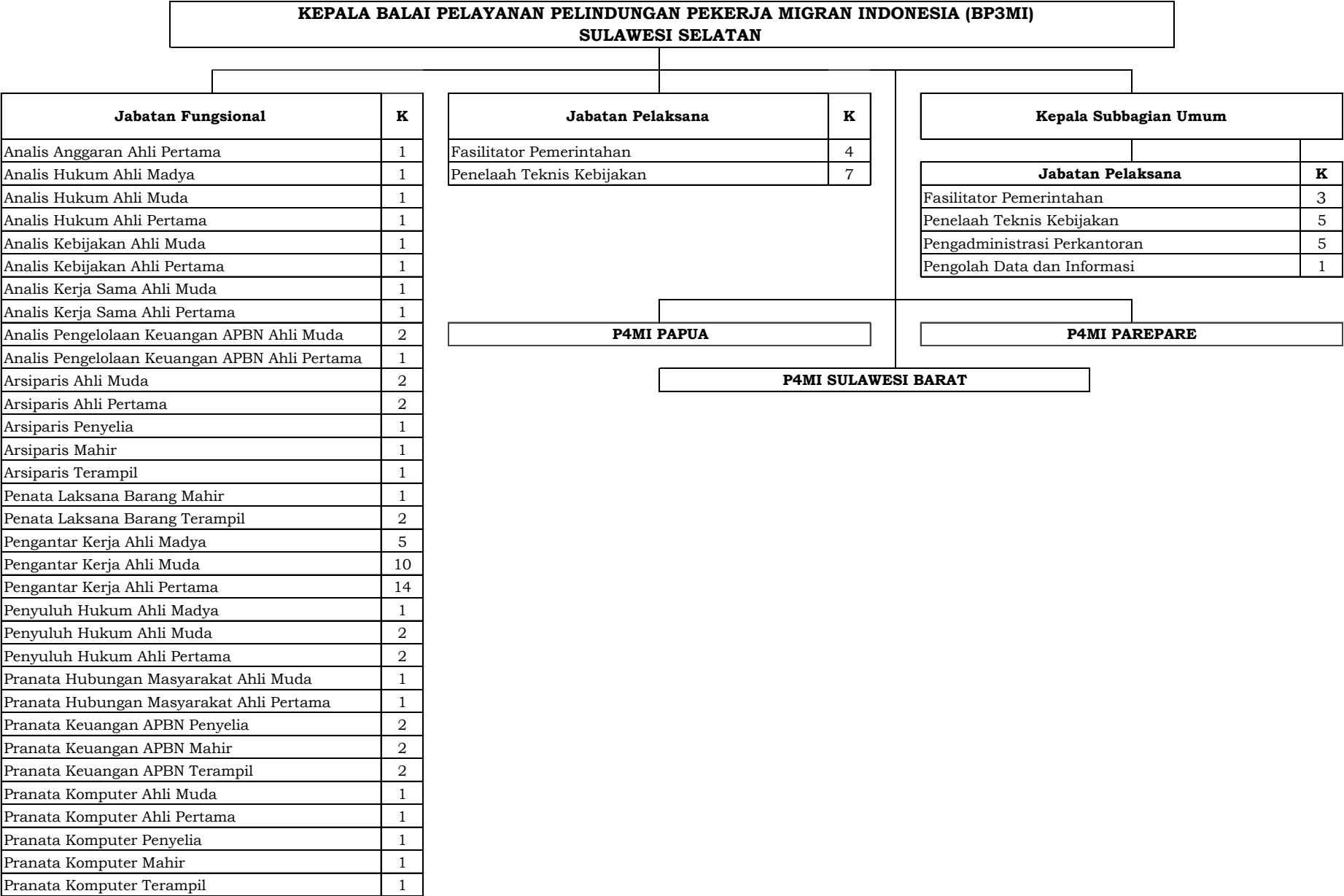
19. BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) KALIMANTAN UTARA

KEPALA BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) KALIMANTAN UTARA			
Jabatan Fungsional	K	Jabatan Pelaksana	K
Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	Fasilitator Pemerintahan	4
Analisis Hukum Ahli Muda	1	Penelaah Teknis Kebijakan	6
Analisis Hukum Ahli Pertama	1		
Analisis Kebijakan Ahli Muda	1		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1		
Analisis Kerja Sama Ahli Muda	1		
Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	1		
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1		
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1		
Arsiparis Ahli Muda	2		
Arsiparis Ahli Pertama	2		
Arsiparis Penyelia	1		
Arsiparis Mahir	1		
Arsiparis Terampil	1		
Penata Laksana Barang Mahir	1		
Penata Laksana Barang Terampil	2		
Pengantar Kerja Ahli Madya	5		
Pengantar Kerja Ahli Muda	8		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	10		
Penyuluh Hukum Ahli Madya	1		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	2		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	2		
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1		
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1		
Pranata Keuangan APBN Penyelia	1		
Pranata Keuangan APBN Mahir	1		
Pranata Keuangan APBN Terampil	1		
Pranata Komputer Ahli Muda	1		
Pranata Komputer Ahli Pertama	1		
Pranata Komputer Penyelia	1		
Pranata Komputer Mahir	1		
Pranata Komputer Terampil	1		
		Kepala Subbagian Umum	
		Jabatan Pelaksana	K
		Fasilitator Pemerintahan	4
		Penelaah Teknis Kebijakan	6
		Pengadministrasi Perkantoran	11
		Pengolah Data dan Informasi	1
		Pengelola Umum Operasional	1
P4MI KALIMANTAN TIMUR			

20. BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) SULAWESI UTARA



21. BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) SULAWESI SELATAN



22. BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) SULAWESI TENGAH

KEPALA BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) SULAWESI TENGAH							
Jabatan Fungsional		K	Jabatan Pelaksana		K	Kepala Subbagian Umum	
Analisis Anggaran Ahli Pertama		1	Fasilitator Pemerintahan		1		
Analisis Hukum Ahli Muda		1	Penelaah Teknis Kebijakan		4		
Analisis Hukum Ahli Pertama		1				Jabatan Pelaksana	
Analisis Kebijakan Ahli Muda		1				Fasilitator Pemerintahan	
Analisis Kebijakan Ahli Peratama		1				Penelaah Teknis Kebijakan	
Analisis Kerja Sama Ahli Muda		1				Pengadministrasi Perkantoran	
Analisis Kerja Sama Ahli Pertama		1				Pengolah Data dan Informasi	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda		2					
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama		1					
Arsiparis Ahli Muda		1					
Arsiparis Ahli Pertama		1					
Arsiparis Penyelia		1					
Arsiparis Mahir		1					
Arsiparis Terampil		1					
Penata Laksana Barang Mahir		1					
Penata Laksana Barang Terampil		2					
Pengantar Kerja Ahli Madya		2					
Pengantar Kerja Ahli Muda		4					
Pengantar Kerja Ahli Pertama		7					
Penyuluh Hukum Ahli Madya		1					
Penyuluh Hukum Ahli Muda		2					
Penyuluh Hukum Ahli Pertama		2					
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda		1					
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama		1					
Pranata Keuangan APBN Penyelia		1					
Pranata Keuangan APBN Mahir		1					
Pranata Keuangan APBN Terampil		1					
Pranata Komputer Ahli Pertama		1					
Pranata Komputer Penyelia		1					
Pranata Komputer Mahir		1					
Pranata Komputer Terampil		1					

23. BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) SULAWESI TENGGARA

KEPALA BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) SULAWESI TENGGARA			
Jabatan Fungsional		Jabatan Pelaksana	
Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	Fasilitator Pemerintahan	1
Analisis Hukum Ahli Muda	1	Penelaah Teknis Kebijakan	7
Analisis Hukum Ahli Pertama	1		
Analisis Kebijakan Ahli Muda	1		
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2		
Analisis Kerja Sama Ahli Muda	1		
Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	2		
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2		
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2		
Arsiparis Ahli Muda	1		
Arsiparis Ahli Pertama	1		
Arsiparis Penyelia	1		
Arsiparis Mahir	1		
Arsiparis Terampil	1		
Penata Laksana Barang Mahir	1		
Penata Laksana Barang Terampil	2		
Pengantar Kerja Ahli Madya	2		
Pengantar Kerja Ahli Muda	4		
Pengantar Kerja Ahli Pertama	7		
Penyuluh Hukum Ahli Madya	1		
Penyuluh Hukum Ahli Muda	2		
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	2		
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1		
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1		
Pranata Keuangan APBN Penyelia	1		
Pranata Keuangan APBN Mahir	1		
Pranata Keuangan APBN Terampil	1		
Pranata Komputer Ahli Pertama	1		
Pranata Komputer Penyelia	1		
Pranata Komputer Mahir	1		
Pranata Komputer Terampil	1		
Kepala Subbagian Umum		Jabatan Pelaksana	
		Fasilitator Pemerintahan	1
		Penelaah Teknis Kebijakan	5
		Pengadministrasi Perkantoran	2
		Pengolah Data dan Informasi	1

24. LOKA PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KALIMANTAN TENGAH

KEPALA LOKA PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (LP3MI) KALIMANTAN TENGAH			
Jabatan Fungsional		Jabatan Pelaksana	
K		K	
Pengantar Kerja Ahli Muda		Fasilitator Pemerintahan	
3		3	
Pengantar Kerja Ahli Pertama		Penelaah Teknis Kebijakan	
3		14	
		Pengadministrasi Perkatoran	
		1	

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN